

**TAHUN  
2022**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah**

Jalan Diponegoro Nomor 060 Telp. (0536) 3221715-3221645 Fax. (0536) 3221715, 3229160  
Palangka Raya 73111

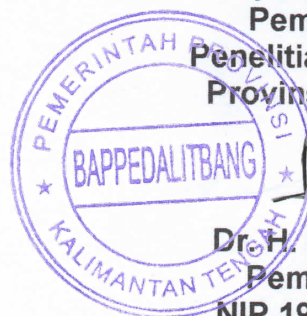
# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai media informasi terkait tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Penyajian laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja instansi.

Palangka Raya, Februari 2023

**Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah**



**Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP.19641020 199003 1 014**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berisikan gambaran kinerja dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan informasi berkaitan dengan (i) capaian kinerja atas target sasaran strategis; (ii) upaya serta hambatan dalam pencapaian kinerja; serta (iii) realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran 1, yaitu Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten dengan realisasi 3 (tiga) indikator yaitu Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD (100%); Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD (99,53%); Persentase Kesesuaian Renja PD dengan Resntra PD (99,45%); Persentase Kesesuaian Renja PD dengan RKPD sebesar 100%. Secara umum, capaian dari sasaran tersebut mencapai 100%.
2. Sasaran 2, yaitu Terwujudnya Hasil Penelitian yang Berkualitas yang Mendukung Pembangunan dan Daya Saing Daerah, indikator kinerja Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah dengan realisasi sebesar 100%.
3. Sasaran 3, yaitu Terwujudnya Pengendalian Program Pembangunan yang Efektif, dengan realisasi 3 (tiga) indikator yaitu indikator Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 85% (fisik) dengan realisasi sebanyak 29 PD; Persentase indikator

RPJMD yang telah mencapai/melebihi target terealisasi 58,74%; Persentase PD dengan minimal capaian program 80% terealisasi 91,30%.

4. Total anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.22.906.108.272,- dengan realisasi sebesar Rp.17.621.937.220,- (76,93%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran yang ditimbulkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat;
- Efisiensi honorarium narasumber;
- Efisiensi perjalanan dinas;
- Sisa belanja jasa pelayanan umum yang disebabkan oleh adanya pe-non aktifan tenaga honorer di tahun 2022.

### Upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

1. Mengoptimalkan proses tahapan perencanaan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan agar dapat memberikan dampak positif dalam penyusunan solusi permasalahan pembangunan di Kalimantan Tengah.
2. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumusan perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan peran koordinasi dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, baik koordinasi lingkup pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun *stakeholders* lainnya.
4. Optimalisasi tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Koordinasi internal yang lebih intensif dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran strategis.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Maksud dan Tujuan .....	2
I.3 Landasan Hukum .....	3
I.4 Tugas dan Fungsi .....	4
I.5 Susunan Organisasi dan Dukungan Sumber Daya Manusia.....	6
I.6 Isu-Isu Strategis .....	8
I.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 .....	10
I.8 Sistematika Laporan .....	10
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	12
II.1 Perencanaan Strategis .....	12
II.1.1 Visi dan Misi .....	12
II.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	15
II.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
II.1.4 Program dan Kegiatan .....	19
II.2 Perjanjian Kinerja .....	20
II.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	20
II.2.2 Anggaran Tahun 2022 .....	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	25
III.1 Hasil Pengukuran Kinerja tahun 2022 .....	26
III.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	31
III.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	71
Bab IV Penutup	
IV.1 Kesimpulan .....	84
IV.2 Tindak Lanjut .....	85
Lampiran	

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan keterbukaan publik terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan terhadap pembangunan daerah semakin tinggi. Menjawab hal tersebut, pelaporan kinerja menjadi salah satu media dalam memberikan informasi berkaitan capaian kinerja pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, sangat mendukung akan keterbukaan publik khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka menjawab tuntutan publik dalam transparansi dan akuntabilitas kinerja maka disusun pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal tersebut merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, disusun sebagai dokumen laporan pelaksanaan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022. Materi dan substansi yang terdapat di dalamnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahun 2022 serta Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2022.

## **I.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Adapun tujuan penyusunan LKIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Menjadi pendorong bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **I.3 Landasan Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (6-224/2021);



8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 39);

#### **I.4 Tugas, Fungsi**

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya disebutkan pasal 704 dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta

menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
- 6) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 7) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
- 8) Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- 9) Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan.

## **I.5 Susunan Organisasi dan Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasana dan Anggaran**

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- f. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Kerja Sama;
- g. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasana dan anggaran tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No.	Jabatan	Jml	Kualifikasi Pendidikan Pegawai					Jenis Kelamin	
			S3	S2	S1	D3	SMA	Laki-Laki	Perempuan
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	
2.	Jabatan Administrasi								
	1. Administrastor	6		4	2			5	1
	2. Pengawas	2			2				2
	3. Pelaksana	31		4	16	1	10	17	14
3.	Jabatan Fungsional								
	1. Perencana	14		5	9			8	6
	2. Surveyor Pemetaan	1			1				1
	3. Penata Ruang	1		1					1
	4. Pranata Komputer	1				1		1	
	5. Peneliti	2			2			2	
	Jumlah	59	1	14	32	2	10	34	25

Berdasarkan data tabel 1.1, jumlah pegawai per 31 Desember 2022 sebanyak 59 pegawai yang didominasi pegawai berpendidikan jenjang Strata 1 sebanyak 32 orang (54,24%), disusul jenjang pendidikan Strata 2 sebanyak 14 orang (23,73%), jenjang SMA/ sederajat sebanyak 10 orang (16,95%), jenjang Diploma 3 sebanyak 2 orang (3,34%) dan jenjang Doktoral sebanyak 1 orang (0,02%).

**Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana**

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
<b>1.</b>	<b>ASET TETAP</b>		<b>44.087.200.459</b>
	a. Tanah	1 unit	6.412.500.000,-
	b. Peralatan dan Mesin	43 jenis	15.581.365.266
	c. Gedung dan Bangunan	2 unit	21.568.154.643,-
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	3 unit	185.468.400,-
<b>2.</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		<b>363.336.000</b>
	a. Aset tidak berwujud	2 unit	363.336.000,-

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja. Pemeliharaan atau perbaikan (rehabilitasi) dilakukan setiap tahun untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki. Penambahan dilakukan untuk menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak berfungsi optimal.

**Tabel 1.3  
Anggaran Tahun 2022**

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	-
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100.000.000	100.000.000	-
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>22.362.779.000</b>	<b>22.906.108.272</b>	<b>543.329.272</b>
	Belanja Operasi	21.832.779.000	22.179.521.772	346.742.772
	- Belanja Pegawai	9.171.272.086	9.171.272.086	-

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
	- Belanja Barang dan Jasa	12.661.506.914	13.008.249.686	346.742.772
	Belanja Modal	530.000.000	726.586.500	196.586.500

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana terlihat pada tabel 1.3, tahun 2022 anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan semula Rp.22.362.779.000,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.543.329.272,- sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp.22.906.108.272,-. Penambahan pagu anggaran untuk mempertajam pencapaian program/kegiatan.

## **I.6 Isu-Isu Strategis**

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal. Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali serta merespon isu strategis dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat.

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam level perangkat daerah, isu strategis pada tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2022, isu strategis dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas, kualifikasi pendidikan maupun kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana khususnya teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan mandat sebagai unit perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan daerah;
- 3) Ketersediaan data dan informasi yang masih terbatas serta belum terorganisir dengan baik dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
- 4) Peningkatan kerjasama antar daerah, lintas sektor/bidang, masyarakat, dunia usaha, LSM, asosiasi profesi khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi;
- 5) Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) oleh Pemerintah Daerah Provinsi dimana dalam pembentukannya

dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;

- 6) Peningkatan pengendalian dan evaluasi kinerja baik lingkup intern perangkat daerah maupun lintas sektor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

#### **I.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 dalam rangka perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan program/kegiatan dalam Rencana Kerja disusun dalam rangka mendukung kinerja sasaran.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi internal dalam rangka pemantauan/monitorin/evaluasi pencapaian kinerja.

#### **I.8 Sistematika Laporan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKIP, landasan hukum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, isu strategis organisasi dan sistematika penulisan LKIP;

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bagian ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan penetapan kinerja tahun 2022 yang menjadi acuan pengukuran kinerja;

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, perbandingan capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, keberhasilan/kegagalan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif.

Dalam bagian ini juga disajikan akuntabilitas keuangan berupa penyajian rencana dan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang telah ditetapkan;

**BAB IV PENUTUP**

Bagian ini mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah.

**LAMPIRAN**



## **BAB II**

# **PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA**

### **II.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Landasan maupun acuan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Selanjutnya dalam rencana strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan pada perangkat daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

#### **II.1.1 Visi dan Misi**

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

**“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”**

Pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.1 Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

No.	Pokok-pokok visi	Penjelasan
1	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing dan memiliki reputasi cemerlang.
2	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi <i>Green Kalteng</i> (Kalteng Hijau) disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalteng yang berkarakter.
4	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin, Kalteng sehat, mandiri, tangguh, dan maju dalam berbagai sektor.
5	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6.	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Selanjutnya untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan yang disebut dengan misi. Misi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;
- 2) Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global;

- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi;
- 4) Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
- 5) Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender;

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

No.	Pokok-pokok Visi	Misi
1.	Bermartabat	Misi 4 Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing
		Misi 1 Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan
2.	Elok	Misi 2 Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global
		Misi 1 Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan
3.	Religius	Misi 5 Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
4.	Kuat	Misi 1 Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan
		Misi 2 Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global
5.	Amanah	Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi
6.	Harmonis	Misi 4 Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung misi ketiga **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.”**

## II.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Selanjutnya sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Penetapan sasaran dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian **sasaran Pemerintah Daerah** yaitu

- 1. Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif;**
- 2. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat.**

Untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah, ditetapkan **tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah** selama lima tahun sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah;**
- 2) Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.**

Adapun **sasaran** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Target 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi  
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	95%	96%	97%	98%	100%
		Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	95%	-	-	-	-
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	95%	96%	97%	98%	100%
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	95%	96%	97%	98%	100%
	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditidakanjuti dalam penyusunan perencanaan	95%	96%	97%	98%	100%
Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	37 PD	38 PD	39 PD	40 PD	41 PD
		Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	70%	73%	75%	78%	80%
		Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	85%	86%	87%	88%	90%

Sumber: Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

### II.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, maka diperlukan strategi serta arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	1. Melaksanakan penelitian/kajian tematik sesuai dengan permasalahan, kondisi objektif sumber daya daerah	1) Penataan sistem perencanaan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah	2. Merumuskan hasil-hasil penelitian/kajian sebagai dasar bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3. Membangun kemitraan koordinatif, integratif, sinkronisasi dan strategis di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kabupaten/kota, antar provinsi, pemerintah sertan non pemerintah 4. Menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang menengah dan tahunan.	2) Penerapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3) Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku. 4) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah antara lain melalui peningkatan kualitas sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program/kegiatan

**Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. 6. Pengembangan penyusunan dokumen perencanaan berbasis online	antar sektor serta koordinasi antar instansi lingkup provinsi, kabupaten/kota dan pusat. 5) Optimalisasi sistem perencanaan berbasis online.
Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	1. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan. 2. Membangun sistem mekanisme pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah.	1) Penataan sistem pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 2) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana guna menjamin konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta pencapaian target kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Sumber: Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

### II.1.4 Program dan Kegiatan

Strategi diartikan sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tahapan atau langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026**

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan



No.	Program	Kegiatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sumber: Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

## **II.2 PERJANJIAN KINERJA**

### **II.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja diartikan sebagai dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	95
		2. Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	%	95
		3. Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	%	95
		4. Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	%	95
2.	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	%	95
3	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	1. Jumlah PD yang target keberhasilannya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	PD	37
		2. Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	%	70
		3. Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	%	85

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

## II.2.2 Anggaran Tahun 2022

Anggaran merupakan salah satu input yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar

Rp.22.906.108.272,- yang terdiri atas 4 program, 16 kegiatan dan 66 sub kegiatan.

Selanjutnya, alokasi anggaran strategis yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2022
<b>Tujuan 1: Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah</b>				
1.	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	315.000.000,-
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.496.210.000,-
			Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	850.000.000,-
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	364.950.000,-
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	561.448.000,-	

*Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2022
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.298.593.000,-
2.	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	947.057.000,-
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	200.000.000,-
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	267.860.000,-
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.</b>				
3.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	499.000.000,-

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 diukur dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja ini mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang ditargetkan untuk dicapai.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

### **III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 memuat 2 (dua) tujuan yaitu

1. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran dan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian kinerja tahun 2022 ini merupakan perjanjian kinerja tahun pertama periode Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1.	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	95%	100%	100%	Sangat tinggi
		Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	95%	99,53%	100%	Sangat tinggi
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	95%	99,45%	100%	Sangat tinggi
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	95%	100%	100%	Sangat tinggi
2.	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	95%	100%	100%	Sangat tinggi



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
3.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	37 PD	29 PD	78,38%	Tinggi
		Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	70%	58,74%	83,91%	Tinggi
		Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	85%	91,30%	100%	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pencapaian dari 3 (tiga) sasaran strategis secara umum dengan predikat sangat tinggi dengan 1 (satu) indikator berpredikat sangat rendah.

Perbandingan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Dearah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah antara tahun 2022 dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya seperti yang digambarkan pada table 3.3 dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) tahun terakhir**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun														
		2018			2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	86%	86,24%	100%	87%	95,7	100%	88%	92,83%	100%	89%	100%	100%	95%	100%	100%
	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	99,53%	100%
	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	86%	80,94%	94,11%	87%	94,29%	100%	88%	66,38%	75,43%	89%	100%	100%	95%	99,45%	100%
	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	86%	94,78%	100%	87%	95,86%	100%	88%	99,68%	100%	89%	100%	100%	95%	100%	100%
2. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	85%	100%	100%	90%	0%	0%	95%	0%	0%	100%	100%	100%	95%	100%	100%

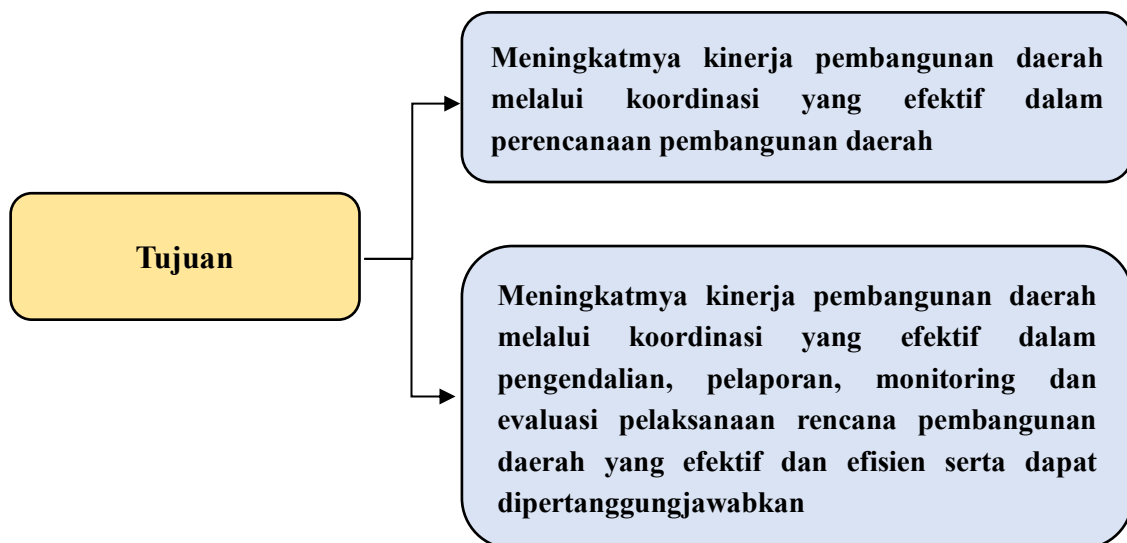
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun														
		2018			2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
yang mendukung pembangunan daya saing daerah																
3. Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	36PD	36PD	100%	37PD	37PD	100%	38PD	38PD	100%	45PD	35PD	77,78%	37PD	29PD	78,37%
	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	77%	45,7%	59,03%	79%	47,45%	60,06%	81%	36,52%	45,08	83%	37,85%	45,60%	70%	20,18%	28,83%
	Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	91,30%

Memperhatikan tabel perbandingan di atas, capaian pada 8 (delapan) indikator kinerja dalam rentang waktu 5 (lima) tahun 2018-2022 hampir setiap indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Di tahun 2020-2021, untuk indikator kinerja “persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target” pada tahun 2021 tidak mencapai target, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19. Hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja RPJMD.

### III.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Dalam mewujudkan misi ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi**”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan menetapkan 2 (dua) tujuan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut.



Dalam rangka mencapai tujuan di atas, ditetapkan (tiga) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis 1</b>
<b>Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten</b>

Salah satu wujud dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai institusi di bidang perencanaan pembangunan daerah adalah adanya keselarasan antara perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan. Keselarasan tersebut digambarkan dalam 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD;
2. Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD;
3. Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD;
4. Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD.

Hubungan sasaran, indikator dan meta indikator sasaran strategis Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan
Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas RKPD sesuai RPJMD}}{\text{Total Program RKPD}} \times 100\%$
	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program Renstra PD sesuai dengan RPJMD}}{\text{Total Program Renstra PD}} \times 100\%$

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan
	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	$\frac{\text{Jumlah Program Renja PD sesuai dengan Renstra PD} + \text{Jumlah Kegiatan Renja PD sesuai dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah Program Renja PD sesuai dengan Renstra PD} + \text{Jumlah Kegiatan Renja PD}} \times 100\%$
	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program dan Kegiatan Renja PD sesuai dengan RKPD}}{\text{Total Program dan Kegiatan Renja PD}} \times 100\%$
Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Kajian/Penelitian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kajian/Penelitian}} \times 100\%$
Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	PD yang realisasi fisik programnya $\geq 95\%$
	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	$\frac{\text{Jumlah indikator RPJMD yang mencapai/melebihi target}}{\text{Jumlah indikator RPJMD}} \times 100\%$
	Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	$\frac{\text{Jumlah PD dengan capaian kinerja program minimal 80% tahun n-1}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$

Kinerja sasaran “Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten” diukur melalui persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pada tahun 2022

dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase kesesuaian RKPD  
dengan RPJMD**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2021- 2026	Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	100%	95%	100%	100%	100%	100%

Analisis ketercapaian sasaran untuk indikator “**Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD**” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD memiliki target 95% dan realisasi 100%. Sumber data diolah berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian program prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dengan hasil perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase kesesuaian} &= \frac{\text{Jumlah Program Prioritas RKPD sesuai RPJMD}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100\% \\
 \text{RKPD dengan} & \\
 \text{RPJMD} & \\
 &= \frac{215}{215} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

2. Memperhatikan realisasi tahun 2021, persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD dapat direalisasikan kembali sebesar 100%.
3. Tahun 2022 merupakan tahun awal kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dalam hal ini target awal Renstra telah dapat

terpenuhi.



- Jumlah program dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebanyak 215 program.
- Jumlah program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 sebanyak 215 program.

- Sehingga dapat diketahui kesesuaian RKPD dengan RPJMD adalah sebesar 100%.

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	-	95%	99,53%	100%	100%	100%

Analisis ketercapaian sasaran untuk indikator “**Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD**” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD memiliki target 95% dan realisasi 99,53%. Sumber data diolah berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian program pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dengan hasil perhitungan:



$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaian Renstra dengan} &= \frac{\text{Jumlah Program Renstra PD sesuai dengan RPJMD}}{\text{Total Program Renstra PD}} \times 100\% \\ \text{Persentase kesesuaian Renstra dengan RPJMD} &= \frac{214}{215} \times 100\% \\ &= 99,53\% \end{aligned}$$

- Memperhatikan capaian pada Renstra periode 2016-2021, indikator persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD dapat direalisasikan pada tahun 2017 sebesar 89,8%. Selanjutnya pada Renstra periode 2021-2026, indikator tersebut terealisasi sebesar 99,53% pada tahun 2022. Hal ini dapat diartikan tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan semakin meningkat.
- Tahun 2022 merupakan tahun awal kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dalam hal ini target awal Renstra telah dapat terpenuhi.



- Jumlah program dalam Renstra PD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 214 program.
- Jumlah program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 sebanyak 215 program.

- Sehingga dapat diketahui kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD adalah sebesar 99,53%.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	100%	95%	99,45%	100%	100%	100%

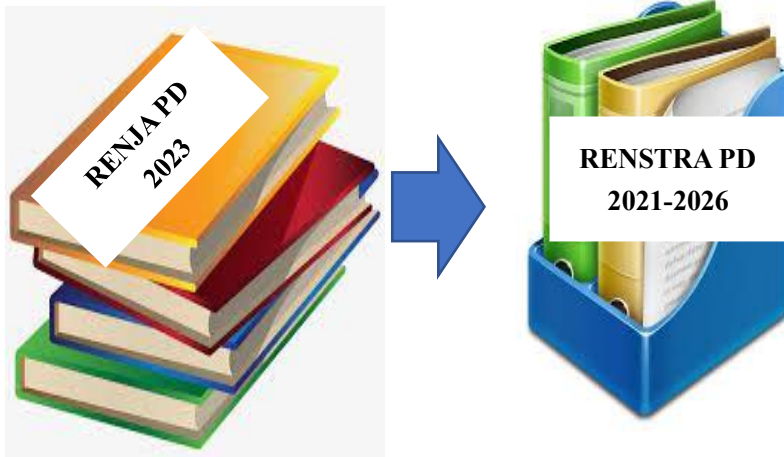
Analisis ketercapaian sasaran untuk indikator “**Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD**” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD memiliki target 95% dan realisasi 99,45%. Sumber data diolah berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian program dan kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 terhadap Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan hasil perhitungan:

$$\begin{aligned}
 &\text{perhitungan:} && \text{Jumlah Program Renja PD} && \text{Jumlah Kegiatan Renja PD} \\
 & && \text{sesuai dengan Renstra PD} && \text{sesuai dengan Renstra PD} \\
 \\
 &\text{Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD} &= & \frac{\text{Jumlah Program Renja PD}}{\text{Jumlah Program Renja PD} + \text{Jumlah Kegiatan Renja PD}} \times 100\% \\
 & & & \frac{217}{217 + 678} \times 100\% \\
 & & & \frac{217}{895} \times 100\% \\
 & & & = 99,45\%
 \end{aligned}$$

2. Pada tahun 2021, indikator persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD terealisasi sebesar 100%. Selanjutnya tahun 2022, indikator

tersebut terealisasi sebesar 99,45%.



- Jumlah program dalam Renja PD Tahun 2023 sebanyak 217 program.
- Jumlah kegiatan dalam Renja PD tahun 2023 yang sesuai dengan Renstra PD sebanyak 678 kegiatan.

- Jumlah kegiatan dalam Renja PD tahun 2023 sebanyak 685 kegiatan.
- Sehingga dapat diketahui kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD adalah sebesar 99,45%.

**Tabel 3.8**

**Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	100%	95%	100%	100%	100%	100%

Analisis ketercapaian sasaran untuk indikator “**Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD**” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD memiliki target 95% dan realisasi 100%. Sumber data diolah berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian program dan kegiatan pada Renja PD tahun 2023 terhadap program dan kegiatan pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dengan hasil perhitungan:

$$\text{Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD} = \frac{\text{Jumlah Program dan Kegiatan Renja PD sesuai dengan RKPD}}{\text{Total Program dan Kegiatan Renja PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{885}{885} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2. Memperhatikan capaian pada tahun sebelumnya, indikator persentase kesesuaian renja PD dengan RKPD dapat sebesar 100% pada tahun 2021. Selanjutnya pada Renstra periode 2021-2026, indikator tersebut terealisasi sebesar 100% pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan tingkat konsisten antar dokumen perencanaan yang didukung oleh para stakeholder dalam menyusun program/kegiatan.



- Jumlah program dan kegiatan renja PD sesuai dengan RKPD sebanyak 885 program dan kegiatan.
- Total program dan kegiatan Renja PD untuk tahun 2023 sebanyak 885 program dan kegiatan.

- Sehingga dapat diketahui Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD adalah sebesar 100%.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 untuk mewujudkan perencanaan daerah yang konsisten antara lain:

- 1) Optimalisasi terkait proses perencanaan antara lain:
  - Pelaksanaan konsultasi publik RKPD tahun 2023 tepat waktu
  - Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam memberikan saran,

masukan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023.

- Penyelenggaraan konsultasi publik dan musrenbang RKPD tahun 2023 secara daring dan luring agar dapat diikuti oleh masyarakat.
- 2) Penyamaan pemahaman dan persepsi dengan perangkat daerah terkait kesesuaian program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- 3) Melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam mengawal penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah agar tetap konsisten antar dokumen perencanaan.
- 4) Melaksanakan proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.
- 5) Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam mencapai perencanaan daerah yang konsisten, ditemukan beberapa kendala, antara lain:

1. Masih terdapat ketidaksamaan pemahaman serta persepsi dalam kesesuaian program dan kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. Hasil verifikasi terhadap dokumen perencanaan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

Pencapaian sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi meliputi:

1. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penyusunan dokumen perencanaan.
2. Dukungan sumber daya manusia fungsional perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam pencapaian keberhasilan sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten, tahun 2022 telah disediakan anggaran melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.315.000.000,- (1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan);
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp.2.891.160.000,- (2 kegiatan dengan 10 sub kegiatan)
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp.2.602.511.000,- (3 kegiatan dengan 17 sub kegiatan)

Realisasi belanja dan efisiensi pada tahun 2022 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Pelaksanaan Proogram, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022**  
**Pada Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 2. Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD 3. Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD 4. Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD								
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>					
				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja Bappedalitbang Provinsi</b>			<b>315.000.000</b>	<b>202.253.977</b>	<b>64,21</b>

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
					<b>Kalimantan Tengah</b>					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkup Bappedalitbang Prov. Kalteng	3 dokumen	3 dokumen	235.000.000	159.736.427	67,97
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Bappedalitbang Prov. Kalteng	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	14.786.875	49,29
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA Bappedalitbang Prov. Kalteng	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	12.860.000	42,87
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Bappedalitbang	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	14.870.675	74,35



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
					Provinsi Kalimantan Tengah					
			<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>					<b>2.891.160.000</b>	<b>2.585.551.486</b>	<b>89,43</b>
				<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan</b>			<b>1.676.210.000</b>	<b>1.076.777.335</b>	<b>64,24</b>
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen nalisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	11.900.000	23,80
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	180.000.000	96.163.550	53,42

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dan Tersusunnya dokumen perencanaan program pembangunan regional Kalimantan serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program Regional Kalimantan					
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen hasil konsultasi publik	2 dokumen	2 dokumen	140.000.000	103.617.489	74,01
				Koordinasi Pelaksanaan	Tersusunnya rancangan awal	1 dokumen	1 dokumen	222.550.000	161.667.257	72,64

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				Forum SKPD/Lintas SKPD	renja perangkat daerah di dalam penyusunan rancangan awal RKPD					
				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Tersusunnya rancangan akhir RKPD hasil Musrenbang Prvinsi	1 dokumen	1 dokumen	452.360.000	267.640.105	59,17
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		4 dokumen	4 dokumen	631.300000	435.788.934	69,03
				<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang</b>	<b>Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi</b>			<b>850.000.000</b>	<b>758.728.423</b>	<b>89,26</b>

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya database data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	121.406.375	80,94
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tersedianya database data informasi perencanaan pembangunan SKPD dan terlaksananya penyerahan DIPA/DPA Prov. Kalteng	2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	12.551.000	50,20

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	675.000.000	624.771.048	92,56
				<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat konsistensi antara RKPD dengan RPJMD</b>			<b>364.950.000</b>	<b>164.502.625</b>	<b>45,08</b>
				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat fasilitasi/evaluasi dokumen perencanaan daerah kabupaten kota	100%	100%	364.950.000	164.502.625	45,08

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
			<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam dan bidang infrastruktur dan kewilayahan			2.602.511.000	2.168.241.439	83,31
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan</b>			<b>742.470.000</b>	<b>428.674.629</b>	<b>57,74</b>

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan, politik, hukum dan keamanan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan, politik, hukum dan keamanan	1 dokumen	1 dokumen	84.517.000	57.524.588	68,06
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1 dokumen	1 dokumen	21.418.000	9.885.950	46,16
				Tersedianya dokumen pelaksanaan aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-	Tersedianya dokumen pelaksanaan aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-	1 dokumen	1 dokumen	30.590.500	15.494.325	50,65

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				HAM) Provinsi Kalimantan Tengah	HAM) Provinsi Kalimantan Tengah					
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya dokumen pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, kesra dan rencana aksi daerah SDG's	3 dokumen	3 dokumen	484.274.500	269.663767	55,68
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersedianya dokumen pelaksanaan percepatan pencapaian target RAD-PG, GERMAS dan PUG	3 dokumen	3 dokumen	121.670.000	76.105.999	62,55



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya data/laporan sebagai bahan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam			561.448.000	539.743.050	96,13
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tersusunnya dokumen perencanaan Renstra, RKPD dan Renja serta usulan program/kegiatan APBN Perangkat Daerah sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku pada	8 dokumen	8 dokumen	150.000.000	142.743.050	95,16

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
					bidang perekonomian					
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya asistensi dalam peningkatan keterpaduan, keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun oleh perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	64.000.000	60.958.696	95,25
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	144.000.000	141.386.350	98,18

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				Bidang Perekonomian	bidang perekonomian					
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan dalam peningkatan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	64.448.000	61.167.631	94,91
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,	Tersusunnya dokumen perencanaan Renstra, RKPD dan Renja serta usulan program/kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	75.000.000	72.209913	96,27

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				RPJMD dan RKPD)	APBN peranzgkat daerah sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku pada bidang SDA					
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA serta tersedianya laporan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rencana aksi	1 dokumen	1 dokumen	64.000.000	61.293.528	95,77

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
					Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)					
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>			<b>1.298.593.000</b>	<b>1.199.823.760</b>	<b>92,39</b>
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rancangan renja PD, Perubahan Renja-PD, RKPD, Perubahan RKPD bidang infrastruktur, serta terselenggaranya koordinasi program pembangunan	4 dokumen	4 dokumen	706.000.000	666.535.494	94,41

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
					perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi					
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur (pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kominfo, persandian dan statistic)	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	89322.675	89,32
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	73.093.000	70.398.875	96,31

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur					
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; perhubungan; kominfo; persandian dan	3 dokumen	3 dokumen	140.000.000	122.997.418	87,86

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
					statistic)					
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah mendukung tata ruang dan pengembangan wilayah	1 dokumen	1 dokumen	50.500.000	40.098.200	79,40
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan serta terlaksananya koordinasi dan fasilitasi simpul KPBU dalam	2 dokumen	2 dokumen	229.000.000	210.471.098	91,91



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
					penyediaan infrastruktur.					

<b>Sasaran Strategis 2</b>
<b>Terwujudnya Hasil Penelitian yang Berkualitas yang Mendukung Pembangunan dan Daya Saing Daerah</b>

Penelitian diartikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data yang dilaksanakan dengan jelas, teliti, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian memiliki peran cukup penting dalam pembangunan. Hasil penelitian dapat memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan penyusunan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Hubungan sasaran, indikator dan meta indikator sasaran strategis Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan
Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Kajian/Penelitian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kajian/Penelitian}} \times 100\%$

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui capaian kinerja dari indikator Persentase Kajian/Penelitian yang Ditidaklanjuti dalam Penyusunan Perencanaan Daerah adalah 100% dari target yang ditetapkan 95% .

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 untuk mencapai sasaran Terwujudnya Hasil Penelitian yang Berkualitas yang Mendukung Pembangunan Daya Saing Daerah antara lain:

1. Penyusunan draft Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Inovasi Daerah sebagai pengungkit daya saing daerah.
2. Penyempurnaan Grand Desain Kalimantan Tengah 2045.
3. Meningkatkan kerja sama dengan akademisi dalam melaksanakan penelitian.
4. Meningkatkan koordinasi baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penelitian serta pengembangan inovasi daerah.

Dalam pencapaian sasaran, terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya manusia khususnya peneliti baik dari segi kuantitas maupun kompetensi.
2. Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah, munculnya berbagai inovasi daerah tetapi tidak terfokus.

Dalam rangka pencapaian target sasaran Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.414.917.000,- yang terdiri atas 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan.

Anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.1.171.586.499,- atau 82,80% dari pagu yang dialokasikan. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran

sebesar Rp.243.330.501,- (17,19%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran antara lain:

- honorarium narasumber
- belanja makan dan minum rapat
- belanja perjalanan dinas

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**

**Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022**

**Pada Sasaran Terwujudnya Hasil Penelitian yang Berkualitas yang Mendukung Pembangunan dan Daya Saing Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2.	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah								
			Penelitian dan Pengembangan		Jumlah dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan					
				<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Terlaksananya koordinasi kelitbangan pusat dan daerah</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>947.057.000</b>	<b>828.653.088</b>	<b>87,50</b>
				Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Tersusunnya dokumen rencana pembangunan Kalteng 2045 dan dokumen laporan pelaksanaan, koordinasi	2 dokumen	2 dokumen	802.057.000	704.849.480	87,88

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
					kelitbangan					
				Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya rakorlitbang dan tersusunnya laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	108.092.858	90,08
				Pengelola Data Kelitbangan dan Peraturan	Terlaksananya pelayanan izin penelitian	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	15.710.750	62,84
				<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>				<b>200.000.000</b>	<b>178.587.125</b>	<b>89,29</b>
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya kajian penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	84.699.125	84,70

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya kajian budidaya ikan di Kalteng	3 dokumen	3 dokumen	100.000.000	93.888.000	93,89
				<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>				<b>267.860.00</b>	<b>164.346.286</b>	<b>61,36</b>
				Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terwujudnya inovasi di setiap perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	227.860.000	134.019.036	58,82
				Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Penerbitan dan publikasi bulletin litbang	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	30.327.250	75,82

<b>Sasaran Strategis 3</b>
<b>Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif</b>

Pemantauan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan sangat penting dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja. Pengendalian program pembangunan berfungsi sebagai kendali pelaksanaan pembangunan agar tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Hubungan sasaran, indikator dan meta indikator sasaran strategis Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan
Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	PD yang realisasi fisik programnya $\geq 95\%$
	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	$\frac{\text{Jumlah indikator RPJMD yang mencapai/melebihi target}}{\text{Jumlah indikator RPJMD}} \times 100\%$
	Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	$\frac{\text{Jumlah PD dengan capaian kinerja program minimal 80\% tahun n-1}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$



**Tabel 3.12  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 85% (fisik)	-	37 PD	29 PD	78,38%	41 PD	100%
2.	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	37,85%	70%	58,74%	83,91%	80%	100%
3.	Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	-	85%	91,30%	100%	90%	100%

Analisis terhadap 3 (tiga) indikator untuk sasaran Terwujudnya Pengendalian Program Pembangunan yang Efektif adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator pertama **“Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 85% (fisik)”** diketahui terdapat 29 perangkat daerah yang keberhasilan programnya sama dengan atau lebih dari 85% atau dengan capaian 78,38% dari target 37 PD.
2. Selanjutnya untuk indikator kedua berupa **“persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target”** terealisasi 58,74% dengan tingkat ketercapaian sebesar 83,91%. Pengukuran berdasarkan capaian indikator per bidang urusan. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung, dimana pencabutan kebijakan PPKM baru dilaksanakan pada 30 Desember 2022 sehingga pada tahun 2022 masih terdapat pembatasan-pembatasan pelaksanaan kegiatan dikarenakan kebijakan PPKM.

3. Pada indikator ketiga **“persentase PD dengan minimal capaian program 80%”** dengan realisasi sebesar 91,30% dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Indikator ini tidak ada dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Upaya yang telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Pengendalian Program Pembangunan yang Efektif antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengendalian rencana pembangunan daerah setiap triwulan, penyusunan dokumen evaluasi triwulanan dan tahunan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program strategis pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas bersama berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dalam pencapaian kinerja sasaran, terdapat beberapa hambatan antara lain:

1. Masa perubahan anggaran berdekatan dengan berakhirnya tahun anggaran, sehingga terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
2. Terdapat penambahan anggaran untuk penanganan inflasi, tetapi waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat.
3. Kondisi pandemi dimana masih diberlakukan kebijakan PPKM dalam pelaksanaan kegiatan.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 dalam pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pengendalian Program Pembangunan yang Efektif disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022**  
**Pada Sasaran Terwujudnya Pengendalian Program Pembangunan yang Efektif**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	1. Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 85% (fisik) 2. Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target 3. Persentase PD dengan minimal capaian program 80%							
			<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>				<b>499.000.000</b>	<b>305.608.514</b>	<b>61,24</b>
			<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat konsistensi antara RKPD dengan RPJMD</b>			<b>499.000.000</b>	<b>305.608.514</b>	<b>61,24</b>
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Tingkat konsistensi antara RKPD dan RPJMD meningkat	85%	100%	190.000.000	147.195.368	77,47
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi antara RKPD dan RPJMD meningkat	85%	100%	309.000.000	158.413.146	51,27

### III.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Sesuai dengan DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/419/DPPA-SKPD/2022, pagu anggaran pada perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp.22.906.108.272,-. Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

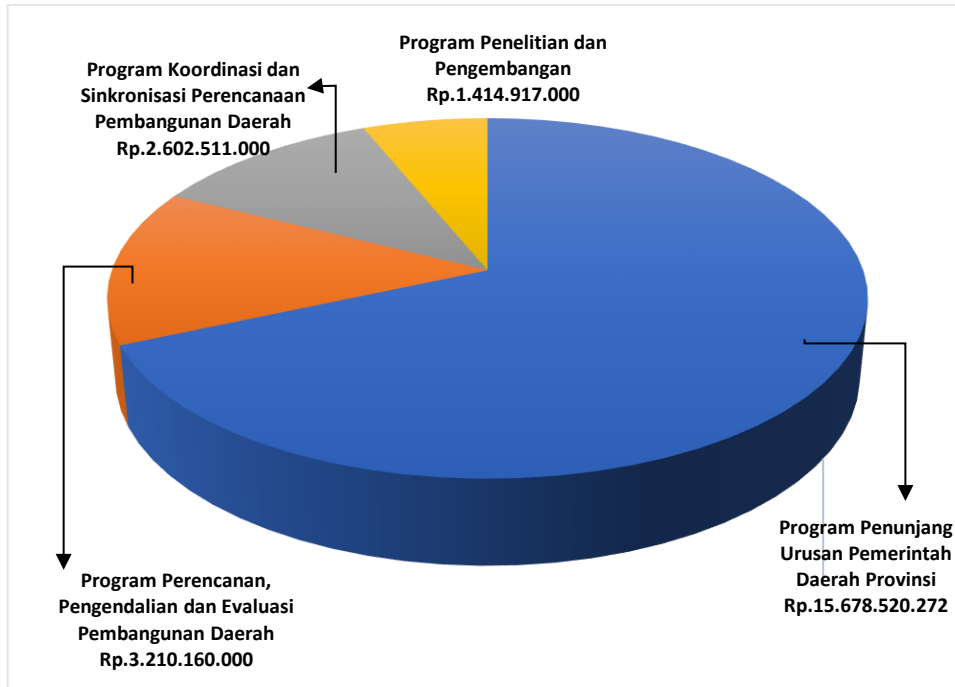
**Tabel 3.14**

**Pagu serta Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No.	Uraian	Pagu APBD (Rp)	Pagu Mendahului Perubahan (Rp)	Pagu APBD Perubahan (Rp)	Realisasi	
					Keuangan (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	9.671.272.086	9.171.272.086	9.171.272.086	7.844.224.719	81,11
2.	Belanja Barang dan Jasa	13.191.506.914	13.191.506.914	13.734.836.186	9.777.712.501	71,19
<b>Jumlah</b>		<b>22.862.779.000</b>	<b>22.362.779.000</b>	<b>22.906.108.272</b>	<b>17.621.937.220</b>	<b>76,93</b>

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

**Gambar 3.1**  
**Komposisi Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2022**



Sumber data: Perubahan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Anggaran belanja dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp.22.906.108.272,- digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program pendukung pencapaian sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian realisasi anggaran Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.318.808.176</b>			<b>11.976.402.385</b>	<b>83,64</b>	<b>100,00</b>
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330.000.000,00	7	Dok	209.484.977,00	63,48	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	235.000.000,00	3	Dok	159.736.427,00	67,97	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	30.000.000,00	1	Dok	14.786.875,00	49,29	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.000.000,00	1	Dok	12.860.000,00	42,87	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	1	Dok	7.231.000,00	48,21	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	1	Dok	14.870.675,00	74,35	100,00

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.600.272.086,00	5	Dok	8.238.403.294	85,81	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	376.000.000,00	1	Dok	358.753.125,00	95,41	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.171.272.086,00	67	orang	7.844.224.719,00	85,53	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	1	Dok	16.685.000,00	83,43	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.000.000,00	1	Dok	9.825.050,00	57,79	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000,00	1	Dok	7.453.400,00	55,21	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000,00	1	Dok	1.462.000,00	58,48	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000,00			31.743.800,00	79,36	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.000.000,00	1	Dok, polis	31.743.800,00	79,36	100,00

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	250	orang	56.210.500,00	56,21	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000,00	1	Dok	45.285.500,00	90,57	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	8	orang	10.925.000,00	21,85	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.210.519.500,00	12	Bulan	931.862.132,00	76,98	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	130.000.000,00	12	Bulan	71.380.000,00	54,91	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	12	bulan	52.477.000,00	87,46	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	115.000.000,00	12	Bulan	114.992.000,00	99,99	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.500.000,00	12	Bulan	107.165.500,00	98,77	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.684.500,00	12	Bulan	46.275.000,00	69,39	100,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	20.000.000,00	12	Bulan	19.440.000,00	97,20	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.450.000,00	12	Bulan	446.803.905,00	94,57	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	237.885.000,00	1	Dok	73.328.727,00	30,83	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	738.000.000,00	100	%	726.848.150,00	98,49	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	738.000.000,00	12	Bulan	726.848.150,00	98,49	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.515.471.590,00	12	Bulan	1.380.723.488,00	91,11	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.950.000,00	12	Bulan	7.700.000,00	96,86	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	630.540.854,00	12	Bulan	537.355.652,00	85,22	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	876.980.736,00	34	tenaga kontrak	835.667.836,00	95,29	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.545.000,00	12	Bulan	401.126.044,00	51,13	100,00

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	404.665.000,00	19	unit	198.584.264,00	49,07	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.880.000,00	12	Bulan	36.450.000,00	48,68	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	1	paket	111.204.500,00	44,48	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,00	100	%	54.887.280,00	99,80	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.390.160.000,00</b>	<b>16</b>	<b>Dok</b>	<b>2.305.616.897,00</b>	<b>68,01</b>	<b>100,00</b>
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.676.210.000,00	11	Dok	1.076.777.335,00	<b>64,24</b>	100,00
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50.000.000,00	1	Dok	11.900.000,00	23,80	100,00
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	180.000.000,00	2	Dok	96.163.550,00	53,42	100,00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	140.000.000,00	2	Dok	103.617.489,00	74,01	100,00

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	222.550.000,00	1	Dok	161.667.257,00	72,64	100,00
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	452.360.000,00	1	Dok	267.640.105,00	59,17	100,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	631.300.000,00	2	Dok	435.788.934,00	74,97	100,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	850.000.000,00	100	%	758.728.423,00	89,26	100,00
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	1	Dok	121.406.375,00	80,94	100,00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	25.000.000,00	2	Dok	12.551.000,00	50,20	100,00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	675.000.000,00	2	Dok	624.771.048,00	92,56	100,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	863.950.000,00	85	%	470.111.139,00	54,41	100,00
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	190.000.000,00	85	%	147.195.368,00	77,47	100,00

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	309.000.000,00	85	%	158.413.146,00	51,27	100,00
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	364.950.000,00	100	%	164.502.625,00	45,08	100,00
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.602.511.000,00</b>	<b>32</b>	<b>Dok</b>	<b>2.168.241.439,00</b>	<b>83,31</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	742.470.000,00	9	Dok	428.674.629,00	57,74	100,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.517.000,00	1	Dok	57.524.588,00	68,06	100,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.418.000,00	1	Dok	9.885.950,00	46,16	100,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.590.500,00	1	Dok	15.494.325,00	50,65	100,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	484.274.500,00	3	Dok	269.663.767,00	55,68	100,00

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	121.670.000,00	3	Dok	76.105.999,00	62,55	100,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	561.448.000,00	11	Dok	539.743.050,00	96,13	100,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000,00	8	Dok	142.733.932,00	95,16	100,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	64.000.000,00	1	Dok	60.958.696,00	95,25	100,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	144.000.000,00	1	Dok	141.386.350,00	98,18	100,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.448.000,00	1	Dok	61.167.631,00	94,91	100,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.000.000,00	4	Dok	72.202.913,00	96,27	100,00

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	64.000.000,00	1	Dok	61.293.528,00	95,77	100,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.298.593.000,00	12	Dok	1.199.823.760,00	92,39	100,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	706.000.000,00	4	Dok	666.535.494,00	94,41	100,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000,00	1	Dok	89.322.675,00	89,32	100,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	73.093.000,00	1	Dok	70.398.875,00	96,31	100,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	140.000.000,00	3	Dok	122.997.418,00	87,86	100,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.500.000,00	1	Dok	40.098.200,00	79,40	100,00

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	229.000.000,00	2	Dok	210.471.098,00	82,54	100,00
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.414.917.000,00</b>	<b>9</b>	<b>Dok</b>	<b>1.171.586.499,00</b>	<b>82,80</b>	<b>100,00</b>
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	947.057.000,00	4	Dok	828.653.088,00	87,50	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	802.057.000,00	2	Dok	704.849.480,00	87,88	100,00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	120.000.000,00	1	Dok	108.092.858,00	90,08	100,00
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	25.000.000,00	1	Dok	15.710.750,00	62,84	100,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	200.000.000,00	2	Dok	178.587.125,00	89,29	100,00
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	100.000.000,00	1	Dok	84.699.125,00	84,70	100,00
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	100.000.000,00	1	Dok	93.888.000,00	93,89	100,00

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No	Program dan Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022				
			Volume Output/ Outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	267.860.000,00	3	Dok	164.346.286,00	61,36	100,00
	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	227.860.000,00	2	Dok	134.019.036,00	58,82	100,00
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	40.000.000,00	1	Dok	30.327.250,00	75,82	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.906.108.272</b>			<b>17.621.937.220</b>	<b>76,93</b>	<b>100,00</b>



## **BAB IV PENUTUP**

### **IV.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, disusun sebagai dokumen laporan pelaksanaan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022. Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan informasi kinerja yang terukur serta sebagai pendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator kinerja yang digunakan mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penelitian, berusaha menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Berdasarkan laporan kinerja pada tahun 2022, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap sasaran 1, yaitu Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten dengan realisasi 3 (tiga) indikator yaitu Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD (100%); Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD (99,53%); Persentase Kesesuaian Renja PD dengan Resntra PD (99,45%); Persentase Kesesuaian Renja PD dengan RKPD (100%). Secara umum, capaian

dari sasaran tersebut mencapai 100%.

2. Sesuai dengan analisis sasaran 2, yaitu Terwujudnya Hasil Penelitian yang Berkualitas yang Mendukung Pembangunan dan Daya Saing Daerah, indikator kinerja Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah dengan realisasi sebesar 100%.
3. Selanjutnya dari analisis sasaran 3, yaitu Terwujudnya Pengendalian Program Pembangunan yang Efektif, dengan realisasi 3 (tiga) indikator yaitu indikator Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 85% (fisik) dengan realisasi sebanyak 29 PD; Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target terealisasi 58,74%; Persentase PD dengan minimal capaian program 80% terealisasi 91,30%.
4. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.22.906.108.272,- dengan realisasi sebesar Rp.17.621.937.220,- (76,93%).

#### **IV.2. TINDAK LANJUT**

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan datang, beberapa hal yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumusan perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan peran koordinasi dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, baik koordinasi lingkup pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun *stakeholders* lainnya.
3. Optimalisasi tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

4. Koordinasi internal yang lebih intensif dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran strategis.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan P. Diponegoro Nomor 60 Palangka Raya 73111  
Telepon/Fax (0536) 3221645

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. SUGIANTO SABRAN**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196410201990031014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan P. Diponegoro Nomor 60 Palangka Raya 73111  
Telepon/Fax (0536) 3221645

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1.1 Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 2. Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD 3. Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD 4. Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	% % % %	95 95 95 95
	1.2 Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	%	95
2.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	1. Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik) 2. Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target 3. Persentase PD dengan minimal capaian Program 80%	PD % %	37 70 85



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan P. Diponegoro Nomor 60 Palangka Raya 73111  
Telepon/Fax (0536) 3221645

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.755.191.000
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.390.160.000
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.377.511.000
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.339.917.000

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. SUGIANTO SABRAN**

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196410201990031014



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan P. Diponegoro Nomor 60 Palangka Raya 73111  
Telepon/Fax (0536) 3221645

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. SUGIANTO SABRAN**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196410201990031014





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan P. Diponegoro Nomor 60 Palangka Raya 73111  
Telepon/Fax (0536) 3221645

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1.1 Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 2. Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD 3. Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD 4. Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	% % % %	95 95 95 95
	1.2 Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	%	95
2.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	1. Jumlah PD yang target keberhasiian programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik) 2. Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target 3. Persentase PD dengan minimal capaian Program 80%	PD % %	37 70 85



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan P. Diponegoro Nomor 60 Palangka Raya 73111  
Telepon/Fax (0536) 3221645

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.755.191.000
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.390.160.000
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.377.511.000
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.339.917.000

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. SUGIANTO SABRAN**

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196410201990031014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan P. Diponegoro Nomor 60 Palangka Raya 73111  
Telepon/Fax (0536) 3221645, 3221715

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Kedua  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. SUGIANTO SABRAN**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196410201990031014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan P. Diponegoro No. 60 Palangka Raya 73111  
Telepon/Fax (0536) 3221645, 3221715

---

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- Unit : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- Tugas : Menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- Fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Bappedalitbang;
  - b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - e. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan KUA dan PPAS, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD);
  - f. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;
  - g. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintahan, antar pemerintah daerah lainnya dengan pusat dan antar lintas pelaku;
  - h. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
  - i. Penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
  - j. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
  - k. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
  - l. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan; dan
  - m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2		3		4	5
1	1.1	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	1.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas RKPD sesuai RPJMD}}{\text{Total Program RKPD}} \times 100\%$	Bappedalitbang
			2.	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program Renstra PD sesuai dengan RPJMD}}{\text{Total Program Renstra PD}} \times 100\%$	
			3.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	$\frac{\frac{\text{Jumlah Program Renja PD sesuai dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah Program Renja PD}} + \frac{\text{Jumlah Kegiatan Renja PD sesuai dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah Kegiatan Renja PD}}}{2} \times 100\%$	
			4.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program dan Kegiatan Renja PD sesuai dengan RKPD}}{\text{Total Program dan Kegiatan Renja PD}} \times 100\%$	
	1.2	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan		$\frac{\text{Jumlah Kajian/Penelitian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kajian/Penelitian}} \times 100\%$	Bappedalitbang
2	Terwujudnya pengendalian		1	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	PD yang realisasi fisik programnya $\geq 95\%$	Bappedalitbang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
	program pembangunan yang efektif	2	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	$\frac{\text{Jumlah Indikator RPJMD yang Mencapai/Melebihi Target}}{\text{Jumlah Indikator RPJMD}} \times 100\%$	
3		Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	$\frac{\text{Jumlah PD dengan capaian kinerja program minimal 80\% tahun n-1}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$		

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. SUGIANTO SABRAN**

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196410201990031014

**Lampiran: LAPORAN TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN 2022**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan IV			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	95	-	100	100,00	
		Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	%	95	95	99,53	100,00	
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	%	95	95	99,45	100,00	
		Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	%	95	95	100	100	
2	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	%	95	95	100	100	
3	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	PD	37	37	29	78,38	
		Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	%	70	70	58,74	83,91	
		Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	%	85	85	91,3	100	

Lampiran: LAPORAN TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN 2022  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

B. Realisasi Keuangan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
					Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			315.000.000	315.000.000	202.253.977	64,21	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		315.000.000	315.000.000	202.253.977	64,21	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	235.000.000	235.000.000	159.736.427	67,97	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	30.000.000	14.786.875	49,29	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	30.000.000	12.860.000	42,87	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	14.870.675	74,35	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			3.390.160.000	3.390.160.000	2.305.616.897	68,01	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.676.210.000	1.676.210.000	1.076.777.335	64,24	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50.000.000	50.000.000	11.900.000	23,80	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	180.000.000	180.000.000	96.163.550	53,42	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	140.000.000	140.000.000	103.617.489	74,01	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	222.550.000	222.550.000	161.667.257	72,64	
			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	452.360.000	452.360.000	267.640.105	59,17	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	631.300.000	631.300.000	435.788.934	69,03	



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
					Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>850.000.000</b>	<b>850.000.000</b>	<b>758.728.423</b>	<b>89,26</b>	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000	150.000.000	121.406.375	80,94	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	25.000.000	25.000.000	12.551.000	50,20	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	675.000.000	675.000.000	624.771.048	92,56	
		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>863.950.000</b>	<b>863.950.000</b>	<b>470.111.139</b>	<b>54,41</b>	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	190.000.000	190.000.000	147.195.368	77,47	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	309.000.000	309.000.000	158.413.146	51,27	
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	364.950.000	364.950.000	164.502.625	45,08	
<b>3</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>2.602.511.000</b>	<b>2.602.511.000</b>	<b>2.168.241.439</b>	<b>83,31</b>	
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>742.470.000</b>	<b>742.470.000</b>	<b>428.674.629</b>	<b>57,74</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.517.000	84.517.000	57.524.588	68,06	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.418.000	21.418.000	9.885.950	46,16	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.590.500	30.590.500	15.494.325	50,65	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
					Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	484.274.500	484.274.500	269.663.767	55,68	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	121.670.000	121.670.000	76.105.999	62,55	
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>561.448.000</b>	<b>561.448.000</b>	<b>539.743.050</b>	<b>96,13</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	150.000.000	150.000.000	142.733.932	95,16	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	64.000.000	64.000.000	60.958.696	95,25	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	144.000.000	144.000.000	141.386.350	98,18	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.448.000	64.448.000	61.167.631	94,91	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.000.000	75.000.000	72.202.913	96,27	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	64.000.000	64.000.000	61.293.528	95,77	
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>1.298.593.000</b>	<b>1.298.593.000</b>	<b>1.199.823.760</b>	<b>92,39</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	706.000.000	706.000.000	666.535.494	94,41	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000	100.000.000	89.322.675	89,32	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	73.093.000	73.093.000	70.398.875	96,31	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
					Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	140.000.000	140.000.000	122.997.418	87,86	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.500.000	50.500.000	40.098.200	79,40	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	229.000.000	229.000.000	210.471.098	91,91	
<b>4</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>			<b>1.414.917.000</b>	<b>1.414.917.000</b>	<b>1.171.586.499</b>	<b>82,80</b>	
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>947.057.000</b>	<b>947.057.000</b>	<b>828.653.088</b>	<b>87,50</b>	
			Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	802.057.000	802.057.000	704.849.480	87,88	
			Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	120.000.000	120.000.000	108.092.858	90,08	
			Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	25.000.000	25.000.000	15.710.750	62,84	
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>178.587.125</b>	<b>89,29</b>	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	100.000.000	100.000.000	84.699.125	84,70	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	100.000.000	100.000.000	93.888.000	93,89	
		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>267.860.000</b>	<b>267.860.000</b>	<b>164.346.286</b>	<b>61,36</b>	
			Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	227.860.000	227.860.000	134.019.036	58,82	
			Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	40.000.000	40.000.000	30.327.250	75,82	
<b>TOTAL</b>				<b>7.722.588.000</b>	<b>7.722.588.000</b>	<b>5.847.698.812</b>	<b>75,72</b>	

**INSTRUMEN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KESESUAIAN RKPD DENGAN RPJMD TAHUN 2021-2026**

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RKPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	-	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSJ Kalawa atei
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
		Program Pengembangan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RKPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
7	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
9	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
10	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
		Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	
		Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
11	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program hubungan Industrial	Program hubungan Industrial	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RKPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RKPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
16	Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
18	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
19	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
20	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
21	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RKPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
22	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
24	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
25	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
27	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
28	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
29	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	



No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RKPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
30	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
31	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	-	
32	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
33	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
34	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	
		Program pengelolaan Energi Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
35	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RKPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
36	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
37	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
38	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
39	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
40	Sekretariat Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
41	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
42	Sekretariat Daerah	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
43	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
44	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
45	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Umum
46	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Administrasi Pimpinan
47	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
48	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RKPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
49	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
50	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
51	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
52	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
53	Pengelolaan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
54	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
55	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	

**INSTRUMEN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KESESUAIAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 DENGAN RPJMD TAHUN 2021-2026**

No.	Urusan	Jumlah Program RPJMD untuk Tahun 2023	Jumlah Program RKPD Tahun 2023	Konsistensi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	6	5	5	Dinas Pendidikan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	5	5	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	3	3	3	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	1	1	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	3	3	3	RSJ Kalawa atei
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	5	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	2	2	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	3	3	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
10	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	7	7	Dinas Sosial
11	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	6	6	6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2	2	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11	11	11	Dinas Lingkungan Hidup
16	Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	4	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	4	4	4	Dinas Perhubungan

No.	Urusan	Jumlah Program RPJMD untuk Tahun 2023	Jumlah Program RKPD Tahun 2023	Konsistensi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
20	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	3	3	3	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
21	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8	8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	6	6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	Dinas Pemuda dan Olahraga
24	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
25	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	6	6	6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	3	3	Dinas Perpustakaan dan Arsip
28	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip
29	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	6	6	6	Dinas Kelautan dan Perikanan
30	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	3	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7	6	6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
32	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	6	6	Dinas Perkebunan
33	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	5	5	5	Dinas Kehutanan
34	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	7	7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
36	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
37	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3	3	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
38	Sekretariat Daerah	2	2	2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
39	Sekretariat Daerah	2	2	2	Biro Kesejahteraan Rakyat
40	Sekretariat Daerah	2	2	2	Biro Hukum
41	Sekretariat Daerah	2	2	2	Biro Perekonomian
42	Sekretariat Daerah	2	2	2	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
43	Sekretariat Daerah	2	2	2	Biro Administrasi Pembangunan
44	Sekretariat Daerah	2	2	2	Biro Organisasi
45	Sekretariat Daerah	1	1	1	Biro Umum
46	Sekretariat Daerah	1	1	1	Biro Administrasi Pimpinan

No.	Urusan	Jumlah Program RPJMD untuk Tahun 2023	Jumlah Program RKPD Tahun 2023	Konsistensi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
47	Sekretariat DPRD	2	2	2	Sekretariat DPRD
48	Perencanaan	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
49	Penelitian	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
50	Keuangan	3	3	3	Badan Keuangan dan Aset Daerah
51	Keuangan	4	4	4	Badan Pendapatan Daerah
52	Kepegawaian	2	2	2	Badan Kepegawaian Daerah
53	Pendidikan dan Pelatihan	2	2	2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
54	Pengelolaan Penghubung	2	2	2	Badan Penghubung
55	Inspektorat Daerah	3	3	3	Inspektorat
56	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Jumlah	218	215	215	

**PERSENTASE KESESUAIAN RKPD  
DENGAN RPJMD**

$$= \frac{\text{Jumlah Program Prioritas RKPD sesuai RPJMD}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{215}{218} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

**INSTRUMEN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KESESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD TAHUN 2021-2026**

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RENSTRA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSJ Kalawa atei
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
		Program Pengembangan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RENSTRA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
7	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
9	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
10	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
		Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	
		Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
11	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program hubungan Industrial	Program hubungan Industrial	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
		Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	



No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RENSTRA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
16	Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
		Program Penataan Desa	Program Penataan Desa	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RENSTRA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
18	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
19	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
20	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
21	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
22	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RENSTRA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
24	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
25	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
27	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
28	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
29	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
30	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
31	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluh Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	-	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RENSTRA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
32	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluh Pertanian	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
33	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
34	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	
		Program pengelolaan Energi Terbarukan	Program pengelolaan Energi Terbarukan	
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
35	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
36	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
37	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
38	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
39	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RENSTRA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
40	Sekretariat Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
41	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
42	Sekretariat Daerah	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
43	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
44	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
45	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Umum
46	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Administrasi Pimpinan
47	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
48	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
49	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
50	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
51	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
52	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
53	Pengelolaan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
54	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

No.	Urusan	Program pada RPJMD	Program RENSTRA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
55	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			

**INSTRUMEN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KESESUAIAN RENJA PD DENGAN RENSTRA PD TAHUN 2023**

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	V	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	V	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	V	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	V	
		Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	V	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	V	
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	V	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	V	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	V	
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	V	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	V	
					Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	V	
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	V	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				V			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				V			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V						

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	v	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	v	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	v	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	v	
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	v	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	v	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	v	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	v	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	v	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	v	
					Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	v	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	v	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	v	
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	v	
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	v	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	



No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V V V V V V	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V  V  V	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V V V V V V V V V V V V	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	v	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	v	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	v	RSJ Kalawa atei
					Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	v	
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	v	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	v	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	v	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	v	Pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	v	
		Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	v	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	v	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	V	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	V	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	V	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	V	
		Program Pengembangan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	V	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	V	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	V	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	V	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	V	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	V	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	V	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara Jalan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara Jalan Jembatan	V	
					Pengelolaan Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	V	
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	V	
					Pembangunan Jalan			
					Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	V	
					Rehabilitasi Jalan			
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	V	
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	V	
					Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	V	
					Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan	V	
Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	V						
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	V						
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan							

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	v	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	v	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	v	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	v	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	v	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	v	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	v	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	v	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	v	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	v	
					Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	v	
					Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	v	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
7	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	V	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	V	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
		Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	V	Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha selama 1 tahun	Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha selama 1 tahun	V	
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	V	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	V	Urusan penyelenggaraan PSU permukiman	Urusan penyelenggaraan PSU permukiman	V	
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	V	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				V			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V						

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	V	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	V	Satuan Polisi Pamong Praja
					Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	V	
					Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V				
		Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	V	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	V	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				V			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				V			
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				V			
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			V	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	V	
					Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
9	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	v		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v		
		Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	v	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	v		
					Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	v		
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	v	v	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota		v
						Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial		v
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti	v					
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti	v					
		Rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	v					
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	v	v	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		v

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Jamminan Sosial	Jamminan Sosial		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	v	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	v	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	v	
		Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	v	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	v	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v						
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	v	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	v			
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	v	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	v	
					Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	v	
					Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	v	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	v	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	v	
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	v	
					Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	v	



No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
11	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program hubungan Industrial	Program hubungan Industrial	v	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	v	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	v	
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	v	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	v	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	v	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v						
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	v	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	v			
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	v			

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	v	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	v	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	v	
					Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten	Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten	v	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	v	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	v	Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Provinsi	Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Provinsi	v	
					Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten/Kota	v	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	v	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	v	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	v	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	v	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	v	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	v	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	v	
					Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	v	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	V	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	V	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	V	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	V	
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	V	
					Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	V	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	V	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	V	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	V	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	V			

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	V	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	V	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	V	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	V	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	V	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	V	
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	V	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	V	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	V	
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	V	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	V	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	V	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	V	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
15	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	v	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	v	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	v	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	v	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	v	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	v	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	v	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	v	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	v	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	v	
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	v	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v						
Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	v	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	v			
			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	v			

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
16	Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	V	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	V	
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	V	
					Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	V	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	V	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	V	
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	V	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	V	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				V			

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa			Penatausahaan Penetapan Susunan, Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	V	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	V	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	V	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	V	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	V	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				V			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V						

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	V	Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	V	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	V	
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	V	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	V	Pengelolaan Pelaksanaan Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Pelaksanaan Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	V	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	V	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	V	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	V	
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	V	
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	V	
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	



No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
19	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	v	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	v	Dinas Perhubungan	
					Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	v		
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	v	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	v		
					Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	v		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v					
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	v	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		v
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	v	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		v

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
20	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	V	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
					Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	V	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	V	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
21	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	v	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	v	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	v	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	v	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	v	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	v	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	v	
		Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	v	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				v			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				v			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v						

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
22	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	v	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	v	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	v	
		Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	v	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	v	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	v	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	v	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	v	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	v	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	v	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				v			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				v			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				v			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v						

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	V	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	V	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	V	
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	V	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	V	
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	V	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	V	
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	V	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	V	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi BMD SKPD	Administrasi BMD SKPD	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				V			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V						
24	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	V	Peyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Peyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	V	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
25	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	v	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	v	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	v	
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	v	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	v	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	v	
					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	v	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	v	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	v	
		Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	v	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	v	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	v	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	v	
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	v	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	v	Pengelolaan Museum Provinsi	Pengelolaan Museum Provinsi	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi BMD SKPD	Administrasi BMD SKPD	v	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				v			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				v			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				v			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v						

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
27	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	V	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	V	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	V	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	V	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi BMD SKPD	Administrasi BMD SKPD	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V				
28	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	V	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	V	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	V	
					Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	V	
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	V	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	V	
					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	V	
					Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	V	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	V	
					Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	V	
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	V	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	V	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	V	
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil			
					Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	V	
					Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			



No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
29	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Dinas Kelautan dan Perikanan		
					Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT					
					Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	V	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing					
					Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing					
					Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	V			
							Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	V

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	V	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	V	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	V	
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi BMD SKPD	Administrasi BMD SKPD	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	V	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	V	
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	V	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
30	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	V	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	V	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	V	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	V	
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	V	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	V	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	V	Dinas Tanaman Pangan,
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	V	
					Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	V	
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	V	
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	V	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	V	Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	V	
					Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
		Program Pengendalian	Program Pengendalian Kesehatan		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
31	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	V	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	V	Hortikultura dan Peternakan
					Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	V	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	V	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	V	
		Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	V	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	V	
					Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi BMD SKPD	Administrasi BMD SKPD	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
				V	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	V	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				V			
Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian				V			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				V			
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				V			
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				V			

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
32	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	V	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	V	Dinas Perkebunan
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi BMD SKPD	Administrasi BMD SKPD	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
		Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Hutan	V	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	V	
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	V	
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	V	
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	V	
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	V	
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	V	
					Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi			
					Perbenihan Tanaman Hutan	Perbenihan Tanaman Hutan	V	
					Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
33	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	V	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	V	Dinas Kehutanan
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	V	
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	V	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	V	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	V	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi BMD SKPD	Administrasi BMD SKPD	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		V					
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	V	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	V	
					Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	V	



No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
34	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Program pengelolaan Energi Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	v	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	v		
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	v	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				
					Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	v		
					Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi				
					Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi				
					Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	v		
					Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	v		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v					



No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	V	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	V	
					Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, & Pengawasan Distribusi, Pengemasan & Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, & Pengawasan Distribusi, Pengemasan & Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	V	
					Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	V	
					Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	V	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	V	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	V	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	V	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	V	
					Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
35	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	v	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	v	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	v	
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	v	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	v	
					Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	v	
					Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	v	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	v	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	v	
					Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	v	
					Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				v			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				v			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v						

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
36	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	√	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	√	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	√	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	√	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	√	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI & IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI & IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	√	
37	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	√	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	√	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	√	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	√	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	√	
38	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	√	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	√	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	√	
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	√	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	√	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	
Program Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	√	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√			
			Program Kesejahteraan Rakyat	√	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	√	
					Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	√	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	√						
39	Sekretariat Daerah				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	Biro Kesejahteraan Rakyat
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
40	Sekretariat Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	V	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	V	Biro Hukum
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V						
41	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	V	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	V	Biro Perekonomian
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	V	
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi di BUMD dan BLUD	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi di BUMD dan BLUD	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V						

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
42	Sekretariat Daerah	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	V	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	V	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	V	
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
43	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	V	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	V	Biro Administrasi Pembangunan
					Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
		Program Penataan Organisasi	Program Penataan Organisasi	V	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	V	
					Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	V	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				V			

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
44	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	Biro Organisasi
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	V	
45	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	Biro Umum
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi BMD SKPD	Administrasi BMD SKPD	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	V	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	V						
46	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	Biro Administrasi Pimpinan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	v	
47	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	v	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	v	Sekretariat DPRD
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	v	
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	v	
					Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	v	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	v	
					Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	v	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	v	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	v			
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	v			
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	v			

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
48	Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	V	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	V	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	V	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	V	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	V	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	V	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	V	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	V	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan Pembangunan	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	V		
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	V		



No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
49	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	V	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	V	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	V	
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	V	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	V	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	V	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V						
50	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	V	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	V	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	V	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	V	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	V	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	V	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V						

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	v	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	v	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	v	
51	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	v	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	v	Badan Kepegawaian Daerah
					Mutasi dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	v	
					Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	v	
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	v	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	v	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	v	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	v	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				v			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				v			

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
52	Pendidikan dan Pelatihan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
53	Pengelolaan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	V	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	V	Badan Penghubung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	V	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	V	
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	V	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	V	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	V	
					Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
54	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	Inspektorat
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
55	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	V	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	V	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	V	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	V	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	V	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	V	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	V	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	V	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	V	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	

No.	Urusan	Program pada RENSTRA	Program Renja	Kesesuaian Program Renstra dan Renja	Kegiatan pada RENSTRA	Kegiatan pada Renja	Kesesuaian Kegiatan Renstra dan Renja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	V	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	
	<b>TOTAL</b>	<b>218</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>699</b>	<b>685</b>	<b>678</b>	

#### KESESUAIAN RENJA PD DENGAN RENSTRA PD TAHUN 2023

$$\frac{\text{Jumlah Program Renja PD sesuai dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah Program Renja PD}} + \frac{\text{Jumlah Kegiatan Renja PD sesuai dengan Renstra PD}}{\text{Jumlah Kegiatan Renja PD}} \times 100\% = \frac{\frac{217}{217} + \frac{678}{685}}{2} \times 100\% = 99,45\%$$

**INSTRUMEN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KESESUAIAN RENJA PD DENGAN RKP**

No.	Urusan	Jumlah Program RKP untuk Tahun 2023	Jumlah Program RENJA Tahun 2023	Jumlah kegiatan RKP untuk Tahun 2023	Jumlah kegiatan RENJA Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	5	5	14	14	Dinas Pendidikan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	5	20	20	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	3	3	13	13	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	1	1	1	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	3	3	11	11	RSJ Kalawa atei
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	25	25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	5	14	14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	2	9	9	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	3	14	14	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
10	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	7	20	20	Dinas Sosial
11	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	6	6	20	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	21	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	5	15	15	Dinas Ketahanan Pangan
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2	2	2	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11	11	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
16	Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	17	17	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	4	11	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	4	4	17	17	Dinas Perhubungan

No.	Urusan	Jumlah Program RKPD untuk Tahun 2023	Jumlah Program RENJA Tahun 2023	Jumlah kegiatan RKPD untuk Tahun 2023	Jumlah kegiatan RENJA Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
20	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	3	3	9	9	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
21	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8	17	17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	6	14	14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	4	15	15	Dinas Pemuda dan Olahraga
24	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
25	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	6	6	16	16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	3	9	9	Dinas Perpustakaan dan Arsip
28	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	2	6	6	Dinas Perpustakaan dan Arsip
29	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	6	6	20	20	Dinas Kelautan dan Perikanan
30	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	3	6	6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7	7	20	20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
32	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	6	14	14	Dinas Perkebunan
33	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	5	5	21	21	Dinas Kehutanan
34	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	19	19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	7	23	23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
36	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	3	3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
37	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3	3	3	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
38	Sekretariat Daerah	2	2	7	7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
39	Sekretariat Daerah	2	2	9	9	Biro Kesejahteraan Rakyat
40	Sekretariat Daerah	2	2	8	8	Biro Hukum
41	Sekretariat Daerah	2	2	9	9	Biro Perekonomian
42	Sekretariat Daerah	2	2	9	9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
43	Sekretariat Daerah	2	2	7	7	Biro Administrasi Pembangunan
44	Sekretariat Daerah	2	2	7	7	Biro Organisasi
45	Sekretariat Daerah	1	1	10	10	Biro Umum
46	Sekretariat Daerah	1	1	7	7	Biro Administrasi Pimpinan

No.	Urusan	Jumlah Program RKPD untuk Tahun 2023	Jumlah Program RENJA Tahun 2023	Jumlah kegiatan RKPD untuk Tahun 2023	Jumlah kegiatan RENJA Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
47	Sekretariat DPRD	2	2	14	14	Sekretariat DPRD
48	Perencanaan	3	3	14	14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
49	Penelitian	1	1	4	4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
50	Keuangan	3	3	14	14	Badan Keuangan dan Aset Daerah
51	Keuangan	4	4	12	12	Badan Pendapatan Daerah
52	Kepegawaian	2	2	12	12	Badan Kepegawaian Daerah
53	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	9	9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
54	Pengelolaan Penghubung	2	2	8	8	Badan Penghubung
55	Inspektorat Daerah	3	3	12	12	Inspektorat
56	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	13	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Jumlah	215	215	670	670	
<p><b>PERSENTASE KESESUAIAN RENJA PD DENGAN RKPD</b> = <math>\frac{\text{Jumlah Program dan Kegiatan Renja PD sesuai dengan RKPD}}{\text{Total Program dan Kegiatan renja PD}} \times 100\%</math></p> <p>= <math>\frac{885}{885} \times 100\%</math></p> <p>= <b>100%</b></p>						



# KERTAS KEBIJAKAN

*(Policy Paper)*

## KAJIAN ANALISIS ASPEK TEKNIS DAN SOSIAL EKONOMI PROGRAM FOOD ESTATE DI KABUPATEN BARITO TIMUR



KERJA SAMA



BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2022

# LAPORAN AKHIR

**KAJIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
(KAJIAN BUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN SUKAMARA)  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**



**KERJA SAMA**



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**2022**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Diponegoro Nomor 60 Telepon (0536) 3221715-3221645, Fax (0536) 3222217  
 PALANGKA RAYA 73111

Palangka Raya, 12 Desember 2022

Kepada

- Yth. 1. Ketua Tim Penelitian Kajian Budidaya  
 Perikanan di Kab. Sukamara Provinsi  
 Kalimantan Tengah Tahun 2022  
 2. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan  
 Pemasaran, Dinas Kelautan dan  
 Perikanan Prov. Kalteng  
 3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan  
 Kerjasama, Bappedalitbang Prov. Kalteng  
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara  
 5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten  
 Sukamara

di -

**Tempat**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 050/1.142/Bid.I/Bapplitbang

No.	DOKUMEN YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Buku Laporan Akhir Hasil Kajian Budidaya Perikanan di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	1 (satu) Eksemplar	Untuk bahan selanjutnya
2.	Kertas Kebijakan ( <i>Policy Brief</i> ) Hasil Kajian Budidaya Perikanan di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	Sda	Sda

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT	PARAF
KABID	
KASUBBID	
PELAKSANA	



**KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI  
 KALIMANTAN TENGAH,**

**Dr. H. KASPINOR, S.E., M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19641020 199003 1 014**

**INSTRUMEN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**JUMLAH PD YANG TARGET KEBERHASILAN PROGRAMNYA TERCAPAI LEBIH ATAU SAMA DENGAN 95% (FISIK)**

No.	Perangkat Daerah	Pagu APBD-P	Realisasi			Keterangan
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	%	
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.272.665.343.210	1.163.698.456.052	91,44	91,44	
2	Dinas Pendidikan	1.144.534.533.068	1.059.573.581.431	92,58	100,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.078.649.041.122	1.009.513.467.671	93,59	95,48	
4	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	422.308.754.614	286.794.204.534	67,91	80,00	
5	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	220.472.908.579	208.560.066.640	94,60	100,00	
6	Dinas Kehutanan	244.823.754.118	156.258.500.923	63,82	65,25	
7	Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	212.107.080.000	177.618.079.251	83,74	84,00	
8	Biro Umum	132.854.404.018	122.684.046.661	92,34	100,00	
9	Badan Pendapatan Daerah	117.985.217.856	100.891.513.329	85,51	85,51	
10	Sekretariat DPRD	104.867.476.349	95.717.172.289	91,27	91,27	
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	96.584.191.933	42.652.308.587	44,16	92,15	
12	Dinas Kesehatan	78.585.512.687	61.767.056.117	78,60	97,00	
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	65.577.242.000	58.618.683.575	89,39	100,00	
14	Dinas Sosial	57.831.019.864	54.697.001.601	94,58	100,00	
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	46.435.949.539	44.077.575.542	94,92	100,00	
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.588.898.309	24.407.076.721	68,58	70,00	
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia	34.787.714.586	31.129.305.774	89,48	100,00	
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.331.978.665	29.110.836.698	90,04	100,00	
18	Dinas Perhubungan	32.218.061.206	29.579.700.604	91,81	91,81	
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.629.835.070	23.542.501.246	79,46	87,57	
20	RSJ Kalawa Atei	28.408.822.087	23.881.788.933	84,06	96,88	
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28.278.732.863	26.314.187.991	93,05	93,05	
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	25.146.004.435	23.124.784.109	91,96	99,82	
23	Dinas Ketahanan Pangan	23.525.261.353	22.469.136.564	95,51	100,00	
24	Satuan Polisi Pamong Praja	23.325.577.182	22.301.892.466	95,61	100,00	
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	23.010.751.256	22.346.622.107	97,11	100,00	
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	22.767.103.661	19.745.398.034	86,73	94,76	
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	21.726.396.176	17.621.937.220	81,11	100,00	
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.735.358.345	17.232.629.652	87,32	100,00	
29	Dinas Perkebunan	18.095.084.828	15.169.078.905	83,83	100,00	



No.	Perangkat Daerah	Pagu APBD-P	Realisasi			Keterangan
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	%	
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	17.503.116.592	14.860.260.975	84,90	100,00	
31	Inspektorat	17.393.136.379	15.047.096.035	86,51	99,00	
32	Dinas Lingkungan Hidup	16.452.296.562	14.977.105.240	91,03	99,87	
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	14.945.745.489	13.265.158.924	88,76	99,38	
34	Badan Kepegawaian Daerah	14.873.654.129	12.195.126.804	81,99	90,72	
35	Badan Penghubung	14.492.080.035	13.420.279.625	92,60	100,00	
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.427.846.660	11.133.852.748	82,92	100,00	
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	11.626.220.382	10.555.875.976	90,79	95,00	
38	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	11.032.806.615	8.983.306.247	81,42	87,50	
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.394.496.537	5.154.315.940	80,61	98,00	
40	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.877.449.000	3.734.513.030	76,57	76,57	
41	Biro Hukum	3.896.575.000	2.786.414.347	71,51	71,51	
42	Biro Administrasi Pimpinan	3.832.158.000	3.496.229.328	91,23	100,00	
43	Biro Pengadaan Barang/Jasa	3.695.952.000	3.178.493.477	86,00	100,00	
44	Biro Administrasi Pembangunan	3.256.175.000	2.890.676.029	88,78	92,02	
45	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	3.037.298.000	2.484.393.806	81,80	100,00	
46	Biro Organisasi	2.361.829.000	1.966.992.013	83,28	86,00	
	Jumlah	5.857.956.844.359	5.131.228.681.771	87,59	92,42	
	 Realisasi Fisik < 95%					
	 Realisasi Fisik ≥ 95%					
<b>Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik) = 29 PD</b>						

**INSTRUMEN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PERSENTASE INDIKATOR RPJMD YANG TELAH MENCAPAI/MELEBIHI TARGET  
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
1	2	3	4			5	6
<b>A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>I. Pendapatan</b>							
1.1	Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (%)	100	105,35	100,00	100,00	Bappenda	Tercapai
1.2	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	40	81,91	100,00		Bappenda	Tercapai
1.3	Indeks kepuasan pelayanan	90	1196	100,00		Bappenda	Tercapai
<b>II. Kesejahteraan Sosial</b>							
<b>2. Pendidikan</b>							
2.1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,5	12,75	87,93	0	Disdik	Tidak Tercapai
2.2	Rata-rata Lama Sekolah	9,5	8,7	91,05		Disdik	Tidak Tercapai
2.3	Angka Melek Huruf	99,8	99,12	99,32		Disdik	Tidak Tercapai
<b>3. Kesehatan</b>							
3.1	Umur Harapan Hidup (tahun)	69,99	70,04	100	100	Dinkes (BPS)	Tercapai
3.2	Persentase Balita Wasting	7,8	8.1	100		Dinkes (Bidang Kesmas)	Tidak Tercapai
3.3	Persentase Balita Stunting (%)	21,1	24.1	100		Dinkes (Bidang Kesmas)	Tidak Tercapai
3.4	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	7,1	7.1	100		Dinkes (Bidang Kesmas)	Tidak Tercapai
3.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	134	137	100		Dinkes (Bidang Kesmas)	Tidak Tercapai
<b>4. Ketenagakerjaan</b>							
4.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	95,90	95,74	99,83	0,00	Disnakertrans	Tidak Tercapai
<b>5. Kesejahteraan Rakyat</b>							
5.1	Jumlah Tempat Ibadah yang Dikelola	200	500	100	100	Biro Kesra	Tercapai
5.2	Jumlah Kelembagaan Spiritual yang Dibina	80	498	100		Biro Kesra	Tercapai
5.3	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	11	199	100		Biro Kesra	Tercapai
<b>III. Seni Budaya dan Olahraga</b>							
<b>1. Kebudayaan</b>							
1.1	Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (grup)	360	492	100	100	Disbudpar	Tercapai
1.2	Jumlah pemanfaatan gedung (kali)	30	55	100		Disbudpar	Tercapai
<b>2. Pemuda Dan Olahraga</b>							
2.1	Jumlah Klub olahraga (buah)	140	140	100	100	Dispora	Tercapai
2.2	Jumlah gedung olahraga (unit)	3	3	100		Dispora	Tercapai
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>I. Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</b>							
<b>1. Pendidikan</b>							
<b>1.1. Pendidikan menengah</b>							
1.1.1	Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berkualifikasi minimal S1/D4	97	99,36	100,00		Disdik	Tercapai
1.1.2	Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang bersertifikasi	55,33	44,65	80,70		Disdik	Tidak Tercapai
1.1.3	Persentase SMA berakreditasi minimal B (%)	62,04	43,21	69,65		Disdik	Tidak Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
1.1.4	Persentase SMK Berakreditasi minimal B (%)	62,04	43,57	70,23	30,00	Disdik	Tidak Tercapai
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	67,67	67,17	99,26		Disdik	Tercapai
1.1.6	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	84,4	84,4	100,00		Disdik	Tercapai
1.1.7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,6	0,6	100,00		Disdik	Tercapai
1.1.8	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	89,25	87,84	98,42		Disdik	Tidak Tercapai
1.1.9	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir	49 %	48 %	97,96		Disdik	Tidak Tercapai
1.1.10	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal Dasar	80 %	75 %	93,75		Disdik	Tidak Tercapai
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>						
2.1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100	100	100	100	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)	Tidak Tercapai
2.2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100	100	100		Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)	Tidak Tercapai
2.3	Insidensi HIV (per 1000 pddk yg tdk terinfeksi HIV)	0.152	.11 (Data sd TW-III)			Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)	Tercapai
2.4	Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	54,62	23,8	43,57	41,67	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)	Tercapai
2.5	Eliminasi malaria (kab/kota)	11	12	100		Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)	Tercapai
2.6	Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk Per 1000 pddk	1.04	1.19	100		Dinkes (Bidang SDK)	Tercapai
2.7	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) (%) (45/100.000)	28,02	27,82	99,29		Dinkes (Bidang SDK)	Tidak Tercapai
2.8	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (9 nakes)	21,71	30,39	100		Dinkes (Bidang SDK)	Tercapai
2.9	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi	99,1	95,1	95,96		Dinkes (Bidang Yankes)	Tidak Tercapai
2.10	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	71	70,96		Dinkes (Bidang Yankes)	Tidak Tercapai
2.11	Cakupan kepesertaan JKN (persen)	91,44	94,47	100		Dinkes (Bidang Yankes)	Tercapai
2.12	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (persen)	90	71,44	79,38		Dinkes (Bidang SDK)	Tidak Tercapai
2.13	Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)	40	33	82,50		Dinkes (Bidang Kesmas)	Tidak Tercapai
2.14	Jumlah Kab/kota yang melakukan Pandu (Pelayanan Terpadu) PTM (penyakit Tidak menular) di > 80% Puskesmas	8	8	100	Dinkes (Bidang P2)	Tercapai	
2.15	Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18	4	22,22	Dinkes (Bidang SDK)	Tidak Tercapai	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,42	0,56	100,00	60,00	DPUPR	Tercapai
3.2	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,32	87,33	100,00		DPUPR	Tercapai
3.3	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam )	41,53	87,33	100,00		DPUPR	Tercapai
3.4	Persentase Jalan Provinsi yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	63,14	bad			DPUPR	
3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	72	86,91	100,00		DPUPR	tercapai
3.6	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	77,45	77,45	100,00		DPUPR	Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4		5	6	
3.7	Rasio Jaringan Irigasi	23,85	23,85	100,00	71,43	DPUPR	Tidak Tercapai
3.8	Persentase penduduk berakses air minum	90,56	77,01	85,04		DPUPR	Tidak Tercapai
3.9	Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	7	4	57,14		DPUPR	Tidak Tercapai
3.10	Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	2.000	1.194,04	59,70		DPUPR	Tidak Tercapai
3.11	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	830	380	45,78		DPUPR	Tidak Tercapai
<b>4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman</b>							
4.1	Persentase Rumah layak huni (%)	59,93	55,34	92,34	71,43	Dinas Perkimtan	
4.2	Rasio rumah layak huni	1 : 6,36	1 : 6,98*	100		Dinas Perkimtan	Tercapai
4.3	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0,0511	0,0510	99,80		Dinas Perkimtan	Tercapai
4.4	Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani (%)	2,381	2,381	100,00		Dinas Perkimtan	Tercapai
4.5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%)	6,061	6,061	100,00		Dinas Perkimtan	Tercapai
4.6	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100,00		Dinas Perkimtan	Tercapai
4.7	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)	100	100	100,00		Dinas Perkimtan	Tercapai
<b>5 Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>							
5.1	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM aktif (Prosentase)	7500%	84,44%	1,13	26,32	Kesbangpol	Tercapai
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah (nilai)	75,25	73,17	97,24		Kesbangpol	Tidak Tercapai
5.3	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang)	200	300	100,00		Kesbangpol	Tercapai
5.4	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (persentase kasus)	70	65,63	93,76		Kesbangpol	Tidak Tercapai
5.5	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (Orang)	9:10000	9:10000	100,00		SatpolPP	Tercapai
5.6	Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih (Orang)	65	-	0,00		Satpol PP	Tidak Tercapai
5.7	Penegakan Perda (kali)	17	6	35,29		SatpolPP	Tidak Tercapai
5.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali)	792	190	23,99		SatpolPP	Tidak Tercapai
5.9	Pengamanan Objek Vital dan Aset Pemerintah Provinsi (kali)	2000	485	24,25		SatpolPP	Tidak Tercapai
5.10	Pengawalan Pejabat atau Tamu VVIP (kali)	100	27	27,00		SatpolPP	Tidak Tercapai
5.11	Koordinasi Kewaspadaan Dini dengan Stakeholder terkait (kegiatan)	10	3	30,00		SatpolPP	Tidak Tercapai
5.12	Persentase Penanganan Pra Bencana	100	25	25,00		BPBPK	Tidak Tercapai
5.13	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	25	25,00		BPBPK	Tidak Tercapai
5.14	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan	100	0	0,00		BPBPK	Tidak Tercapai



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
5.15	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100	25	25,00	50	BPBPK	Tidak Tercapai
5.16	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12	12	100,00		BPBPK	Tercapai
5.17	Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompeten	10	10	100,00		BPBPK	Tercapai
5.18	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	100	100	100,00		BPBPK	Tercapai
5.19	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	25	25,00		BPBPK	Tidak Tercapai
<b>6 Sosial</b>							
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)	65	65	100	50	Dinsos	Tercapai
6.2	PPKS yang memperoleh bantuan sosial (Orang)	1000	4.025	100		Dinsos	Tercapai
6.3	Jumlah penanganan kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus)	100	80	80		Dinsos	Tidak Tercapai
6.4	Potensi dan Sumber Kesos (PSKS ) yang mendapat Pembinaan	3000,000	2.239	75		Dinsos	Tidak Tercapai
6.5	Jumlah Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KK)	150	200	100		Dinsos	Tercapai
6.6	Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inklusivitas di dalam panti (orang)	260	134	52		Dinsos	Tidak Tercapai
<b>II. Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar</b>							
<b>1 Tenaga Kerja</b>							
1.1	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjianjian Bersama	80	79,21	99,01	0,00	Disnakertrans	Tidak Tercapai
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,5	67,23	92,73		Disnakertrans	Tidak Tercapai
1.3	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	2500	160	6,40		Disnakertrans	Tidak Tercapai
1.4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,1	4,26	103,90		Disnakertrans	Tidak Tercapai
1.5	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	78,00	65,84	84,41		Disnakertrans	Tidak Tercapai
<b>2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,9	82,08	100,00	80,00	DP3AP2KB	tercapai
2.2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,43	3,38	98,54		DP3AP2KB	Tidak Tercapai
2.3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85	108,36	100,00		DP3AP2KB	Tercapai
2.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	100		DP3AP2KB	Tercapai
2.5	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	50	100	100		DP3AP2KB	Tercapai
<b>3 Pangan</b>							
3.1	Skor Pola Harapan (PPH) Konsumsi (%)	88,3	87,2	98,8	80,0	DKP	Tidak Tercapai
3.2	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	32.000	40.000	100,0		DKP	Tercapai
3.3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	50,5	55,5	100,0		DKP	Tercapai
3.4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	2	2	100,0		DKP	Tercapai
3.5	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	90	95	100,0		DKP	Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4		5	6	
<b>4 Pertanahan</b>							
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1,10	1,08	98,18	50,00	Dinas Perkimtan	Tidak Tercapai
4.2	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	20,2	44,7	100,00		Dinas Perkimtan	Tercapai
<b>5 Lingkungan Hidup</b>							
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,30	76,62	100	50	DLH	Tercapai
5.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	76	11,83	15,57		DLH	Tidak Tercapai
<b>6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
6.1	Penerbitan Kartu Keluarga (dokumen)	822.460	856.924	100	87,50	Disdukcapil	Tercapai
6.2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	98	98	100		Disdukcapil	Tidak Tercapai
6.3	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan (%)	42	49	100		Disdukcapil	Tercapai
6.4	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun (%)	97	112	100		Disdukcapil	Tercapai
6.5	Persentase Penerbitan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (%)	72,25	99,31	100		Disdukcapil	Tercapai
6.6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	38	54	100		Disdukcapil	Tercapai
6.7	Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (lembaga pengguna)	2	1	50		Disdukcapil	Tidak Tercapai
6.8	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk (%)	100	100	100		Disdukcapil	Tercapai
<b>7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
7.1	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	650	650	100	66,67	Dinas PMD	Tercapai
7.2	Jumlah Desa Mandiri	60	87	100		Dinas PMD	Tercapai
7.3	Jumlah Desa Berkembang	767	767	100		Dinas PMD	Tercapai
7.4	Jumlah Desa Tertinggal	330	330	100		Dinas PMD	Tercapai
7.5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	720	425	59		Dinas PMD	Tidak Tercapai
7.6	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/keurahan dan lembaga adat yang aktif	1730	0	0		Dinas PMD	Tidak Tercapai
<b>8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	54,01	89,54	20,00	DP3AP2KB	Tidak Tercapai
8.2	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,10	2,24	100,00		DP3AP2KB	Tercapai
8.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mPCR)	73,23	20,00	27,31		DP3AP2KB	Tidak Tercapai
8.4	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,36	67,08	0,00		DP3AP2KB	Tidak Tercapai
8.5	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	21	20	92,90		DP3AP2KB	Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
<b>9 Perhubungan</b>							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)	1500000	1.346.111	90	10	Dishub	Tidak Tercapai
9.2	Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	380	33.251	100		Dishub	tercapai
9.3	Rasio Izin Trayek	0,000074	0,000065	87,84		Dishub	Tidak Tercapai
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/Terminal Bus	3	0	0		Dishub	Tidak Tercapai
9.5	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	60	58	96,17		Dishub	Tidak Tercapai
9.6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	85	80	94,12		Dishub	Tidak Tercapai
9.7	Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat (%)	100	22,8	22,80		Dishub	Tidak Tercapai
9.8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,012	0,01	83,33		Dishub	tercapai
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum darat (Orang/Barang)	200.000 / 220.000	234.146 Orang / 7.118 ton	0		Dishub	Tidak Tercapai
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	2.150.000 orang/32.320.000 ton	1.346.111 Orang / 1.965.926 ton	100		Dishub	tercapai
<b>10 Komunikasi dan Informatika</b>							
10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	60	55	92	57,14	Diskominfoantik	Tidak Tercapai
10.2	Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik	600	9258	100		Diskominfoantik	Tercapai
10.3	Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	43	43	100		Diskominfoantik	Tercapai
10.4	Jumlah lokasi yang terhubung dengan <i>Fiber Optic</i> (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	43	43	100		Diskominfoantik	Tercapai
10.5	Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah	500	64	13		Diskominfoantik	Tidak Tercapai
10.6	Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (co-location/hosting)	30	30	100		Diskominfoantik	Tercapai
<b>11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
11.1	Persentase Kontribusi UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	12,00	39,47	100,00	81,25	Diskop,UKM	Tercapai
11.2	Jumlah Wirausaha (Unit)	71.495	121.458	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.3	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	48.000	121.149	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.4	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	9,99	69,88	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.5	Persentase Rasio Kewirausahaan	5,09	8,61	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.6	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit)	4.200	3.672	87,43		Diskop,UKM	Tidak Tercapai
11.7	Jumlah UMKM yang di dampingi (Unit)	480	481	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.8	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP- Kop/KJKS) (Unit)	2.000	2.571	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.9	Persentase koperasi aktif (%)	83,21	80,85	97,16		Diskop,UKM	Tidak Tercapai
11.10	Pertumbuhan Koperasi (Unit)	50	81	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.11	Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%)	17,50	18,92	100,00		Diskop,UKM	Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
11.12	Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit)	12	12	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.13	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang)	240	210	87,50		Diskop,UKM	Tidak Tercapai
11.14	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset (%)	1,75	6,02	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.15	Koperasi Modern (Unit)	2	2	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
11.16	Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	1,50	6,28	100,00		Diskop,UKM	Tercapai
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	700	2578	100	80,00	DPM dan PTSP	Tercapai
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (dalam juta rupiah)	7.980.000	14.425.177,06	100		DPM dan PTSP	Tidak Tercapai
12.3	PMDN (dalam Juta Rupiah)	5.586.000	6.556.819,50	100		DPM dan PTSP	Tidak Tercapai
12.4	PMA (dalam US \$ Ribu)	163.972,60	548.317,60	100		DPM dan PTSP	Tidak Tercapai
12.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasin(%)	7,55	65,2	100		DPM dan PTSP	Tercapai
12.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%)	80	86,58	100		DPM dan PTSP	Tercapai
12.7	Jumlah Perizinan yang Terbit Tetap Waktu	595	261	43,87		DPM dan PTSP	Tidak Tercapai
12.8	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	4	6,0	100,00		DPM dan PTSP	Tidak Tercapai
12.9	Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang dikelola dengan baik	5	12	100		DPM dan PTSP	Tercapai
12.10	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi	2	1	50		DPM dan PTSP	Tidak Tercapai
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	80,70%	80,70%	100	85,71	Dispora	Tercapai
13.2	Persentase Wirausaha Muda	33,80%	33,80%	100		Dispora	Tercapai
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	71,42%	71,42%	100		Dispora	Tercapai
13.4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	43,75%	43,75%	100		Dispora	tercapai
13.5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	42,68%	42,68%	100		Dispora	tercapai
13.6	Jumlah Atlet Berprestasi	10	12	100		Dispora	tercapai
13.7	Jumlah Prestasi Olahraga	10	9	90		Dispora	Tidak Tercapai
<b>14</b>	<b>Statistik</b>						
14.1	Buku " Kalimantan Tengah Dalam Angka"	Ada	bad		100,00	Diskominfosantik	
14.2	Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	Ada	bad			Diskominfosantik	
14.3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	100		Diskominfosantik	tercapai
<b>15</b>	<b>Persandian</b>						
15.1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	410	402	98,05	0	Diskominfosantik	Tidak Tercapai
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>						
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	3	1	33,33	0	Disbudpar	Tidak Tercapai
16.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	631	361	57,21		Disbudpar	Tidak Tercapai
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>						
17.1	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (eks)	146,000	bad			DPAD	
17.2	Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan	26.675	bad			DPAD	
17.3	Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Peperustakaan Berbasis Inklusi Sosial	14	bad			DPAD	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
17.4	Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan	80,00%	bad			DPAD	
17.5	Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	32.000	bad			DPAD	
17.6	Jumlah Naskah Kuno yang terlestarikan (Naskah)	1	bad			DPAD	
<b>18 Kearsipan</b>							
18.1	Presentase SOPD Menerapkan Arsip Secara Baku Sesuai Standar Kearsipan	100%	bad			DPAD	
<b>III. Urusan Pilihan</b>							
<b>1 Kelautan dan Perikanan</b>							
1.1	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	128.008,34	125.143,78	97,76	70,00	Dislutkan	Tidak Tercapai
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	133.136,62	148.754,42	100,00		Dislutkan	Tercapai
1.3	Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	55,81	56,46	100,00		Dislutkan	Tercapai
1.4	Jumlah kebutuhan benih ikan (ekor)	69.820	66.620	95,42		Dislutkan	Tidak Tercapai
1.5	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	108,25	103,52	95,63		Dislutkan	Tidak Tercapai
1.6	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,2	3,5	100,00		Dislutkan	Tercapai
1.7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85	85	100,00		Dislutkan	Tercapai
1.8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	45	231	100,00		Dislutkan	Tercapai
1.9	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2	2	100,00		Dislutkan	Tercapai
1.10	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.761,84	34.852,94	100,00		Dislutkan	Tercapai
<b>2 Pertanian dan Peternakan</b>							
<b>2.1. Luas panen tanaman pangan</b>							
2.1.1	Padi (Ha) :	165.849	109.756	66,18	0	DPTPHP	Tidak Tercapai
2.1.2	Jagung (Ha)	27.408	13.440	49,04		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.1.3	Kedelai(Ha)	96,3	6,0	6,23		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.1.4	Ubi Kayu (Ha)	3.413	1.943	56,94		DPTPHP	Tidak Tercapai
<b>2.2. Produktivitas tanaman pangan</b>							
2.2.1	Padi (ku/Ha)	3,98	32,24	100,00	0,00	DPTPHP	Tercapai
2.2.2	Jagung (Kwintal/Ha)	5,72	50,83	100,00		DPTPHP	Tercapai
2.2.3	Kedelai (Kwintal/Ha)	1,58	16,23	100,00		DPTPHP	Tercapai
2.2.4	Ubi Kayu (Kwintal/Ha)	26,84	293,50	100,00		DPTPHP	Tercapai
<b>2.3. Produksi tanaman pangan</b>							
2.3.1	Padi (Ton)	644.288	353.865	54,92	0	DPTPHP	Tidak Tercapai
2.3.2	Jagung (Ton)	143.551,14	68.317	47,59		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.3.3	Kedelai (Ton)	150,69	10	6,64		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.3.4	Ubi Kayu (Ton)	106.666,39	57.039	53,47		DPTPHP	Tidak Tercapai
<b>2.4. Luas Panen Tanaman Hortikultura</b>							
2.4.1	Buah-Buahan (Ku)				40		
	a. Jeruk (Ha)	548	347	63		DPTPHP	Tidak Tercapai
	b. Durian (Ha)	1036	47.953	100		DPTPHP	tercapai
	c. Rambutan (Ha)	2734	5.034	100		DPTPHP	tercapai
	d. Nanas (Ha)	484	105	22		DPTPHP	Tidak Tercapai
	e. Pisang (Ha)	2011	503	25		DPTPHP	Tidak Tercapai
	Sayuran (Ku)						
	a. Bawang Merah (Ha)	1,024	24	100		DPTPHP	tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
2.4.2	b. Cabai Besar (Ha)	1,046	222	100	100	DPTPHP	tercapai
	c. Cabai Rawit (Ha)	2,326	778	100		DPTPHP	tercapai
	d. Kacang Panjang (Ha)	2,040	768	100		DPTPHP	tercapai
2.4.3.	Tanaman Hias (Tangkai)				50		
	a. Anggrek	1,531	290	100		DPTPHP	tercapai
	b. Mawar	865	310	35,84		DPTPHP	tercapai
2.4.4	Tanaman Obat (Kg)				100		
	a. Jahe	380,986	312.078	100		DPTPHP	tercapai
	b. Kunyit	194,509	102.066	100		DPTPHP	tercapai
<b>2.5. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura</b>							
2.5.1	Buah-Buahan (Ku)				100		
	a. Jeruk (Ton)	13,734	4.660	100		DPTPHP	tercapai
	b. Durian (Ton)	5,639	2.810	100		DPTPHP	tercapai
	c. Rambutan (Ton)	8,046	6.011	100		DPTPHP	Tidak Tercapai
	d. Nanas (Ton)	15,110	7.897	100		DPTPHP	Tidak Tercapai
	e. Pisang (Ton)	33,063	24.925	100		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.5.2	Sayuran (Ku)				100		
	a. Bawang Merah (Ton)	7,885	85	100		DPTPHP	tercapai
	b. Cabai Besar (Ton)	6,219	1.173	100		DPTPHP	tercapai
	c. Cabai Rawit (Ton)	8,001	4.854	100		DPTPHP	tercapai
	d. Kacang Panjang (Ton)	7,463	3.970	100		DPTPHP	tercapai
2.5.3	Tanaman Hias (Tangkai)				100		
	a. Anggrek	9,848	323	100		DPTPHP	tercapai
	b. Mawar	6,121	364	100		DPTPHP	tercapai
2.5.4	Tanaman Obat (Kg)				100		
	a. Jahe	707,018	498.864	100		DPTPHP	tercapai
	b. Kunyit	317,159	155.047	100		DPTPHP	tercapai
<b>2.6 Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura</b>							
2.6.1	Buah-Buahan (Ku/Pohon)				20,00		
	a. Jeruk (Ton/Ha)	18,49	13,44	72,69		DPTPHP	Tidak Tercapai
	b. Durian (Ton/Ha)	6,38	0,06	0,94		DPTPHP	Tidak Tercapai
	c. Rambutan (Ton/Ha)	4,64	1,19	25,65		DPTPHP	Tidak Tercapai
	d. Nanas (Ton/Ha)	92,81	75,39	81,23		DPTPHP	Tidak Tercapai
	e. Pisang (Ton/Ha)	19,98	49,51	100,00		DPTPHP	Tercapai
2.6.2	Sayuran (Ku/Ha)				50		
	a. Bawang Merah (Ton/Ha)	6,93	3,63	52,38		DPTPHP	Tidak Tercapai
	b. Cabai Besar (Ton/Ha)	6,03	5,29	87,73		DPTPHP	Tidak Tercapai
	c. Cabai Rawit (Ton/Ha)	6,14	6,24	100		DPTPHP	Tercapai
	d. Kacang Panjang (Ton/Ha)	2,48	5,17	100		DPTPHP	Tercapai
2.6.3	Tanaman Hias (Tangkai/m2)				0		
	a. Anggrek	5,54	1,11	20,04		DPTPHP	Tidak Tercapai
	b. Mawar	3,4	1,17	34,41		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.6.4	Tanaman Obat (Kg/m2)				0		
	a. Jahe	2,16	1,6	74,07		DPTPHP	Tidak Tercapai
	b. Kunyit	1,9	1,52	80		DPTPHP	Tidak Tercapai
<b>2.7 Populasi Ternak</b>							
2.7.1	Sapi Potong (Ekor)	102,388	87.883	85.833	12,50	DPTPHP	Tidak Tercapai
2.7.2	Kerbau (Ekor)	14,137	11.436	80.894		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.7.3	Kambing (Ekor)	55,120	52.405	95.074		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.7.4	Babi (Ekor)	269,990	198.560	73.543		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.7.5	Ayam Buras (Ekor)	3,282,280	2.952.269	#VALUE!		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.7.6	Ayam Ras Petelur (Ekor)	510,372	531.461	100		DPTPHP	Tercapai
2.7.7	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	26,984,555	23.647.963	#VALUE!		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.7.8	Itik (Ekor)	342,868	296.588	86.502		DPTPHP	Tidak Tercapai
<b>2.8 Jumlah Produksi Daging Ternak</b>							
2.8.1	Sapi Potong (Ton)	5,229	3.966	75.846		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.8.2	Kerbau (Ton)	96	69	72		DPTPHP	Tidak Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
2.8.3	Kambing (Ton)	248	232	94	22,22	DPTPHP	Tidak Tercapai
2.8.4	Babi (Ton)	2,001	1.851	92.504		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.8.5	Ayam Buras (Ton)	2,750	2.576	93.673		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.8.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	43	344	100		DPTPHP	Tercapai
2.8.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	41,815	33.568	80.277		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.8.8	Itik (Ton)	225	277	100		DPTPHP	Tercapai
2.8.9	Sapi Potong (Ton)	5,229	3.966	75.846		DPTPHP	Tidak Tercapai
<b>2.9 Telur</b>							
2.9.1	Ayam Buras (Kg)	2,545,192	2.448.247	#VALUE!	0	DPTPHP	Tidak Tercapai
2.9.2	Ayam Ras Petelur (Kg)	6,996,324	4.654.354	#VALUE!		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.9.3	Itik (Kg)	1,791,951	1.726.409	#VALUE!		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.10	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kalteng (%)	6,88	3,73	54,22		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.11	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	1,45	1,23	84,83		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.12	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2,43	0,48	19,75		DPTPHP	Tidak Tercapai
2.13	Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	3	1,46	48,67		DPTPHP	Tidak Tercapai
<b>3 Pariwisata</b>							
3.1	Jumlah wisatawan (orang)	820.457	1.598.297	100	100	Disbudpar	Tercapai
<b>4 Perdagangan</b>							
4.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	7,30	7,44	100,00	71,43	Disdagperin	Tercapai
4.2	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%)	15,00	12,15	#VALUE!		Disdagperin	Tidak Tercapai
4.3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalteng (Juta US \$)	1.700	5.291,17	100,00		Disdagperin	Tercapai
4.4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	5,00	95,52	100		Disdagperin	Tercapai
4.5	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%)	5,90	6,35	100,00		Disdagperin	Tercapai
4.6	Pengaduan Konsumen Terkait Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100	100		Disdagperin	Tercapai
4.7	Peningkatan Sampel Produk yang Memenuhi Standar Uji Mutu	10,50	-26,00	0,00		Disdagperin	Tidak Tercapai
<b>5 Kehutanan</b>							
5.1.	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen)	90	91	100	56	Dishut	Tercapai
5.2	Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar)	30,000	397.717	100		Dishut	Tercapai
5.3	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	1,000	111,35	0		Dishut	Tidak Tercapai
5.4	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar)	299,000	1.554,00	100		Dishut	Tidak Tercapai
5.5	Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)	345,000	282.812,4	0		Dishut	Tidak Tercapai
5.6	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	100	100	100		Dishut	Tercapai
5.7	Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (hektar)	58,341	-	0		Dishut	Tidak Tercapai
5.8	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas gold/silver (unit)	150	378	100		Dishut	Tercapai
5.9	Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)	0,97	dalam proses TW IV (bad)	#VALUE!		Dishut	
5.10	Jumlah Dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (dokumen)	1	-	0		Dishut	Tidak Tercapai
<b>6 Perkebunan</b>							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
6.1	Persentase Penanganan Organisme Penyakit Tanaman (OPT)	70%	70%	100%	75	Disbun	Tercapai
6.2	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51	51	100		Disbun	Tercapai
6.3	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)	50%	50%	100%		Disbun	Tercapai
6.4	Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80%	80%	100%		Disbun	Tercapai
6.5	Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	697	100		Disbun	Tercapai
6.6	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	bad	bad		Disbun	tidak tercapai
6.7	Persentase Peningkatan NTP sub sektor Perkebunan	0,08	(131,29-155,99)	0,00		Disbun	tidak tercapai
6.8	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,12%	0,12%	100,00%		Disbun	Tercapai
<b>7 Perindustrian</b>							
7.1	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan (%)	16,00	15,43	96,44	50,00	Disdagperin	Tidak Tercapai
7.2	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,00	7,77	100,00		Disdagperin	Tercapai
<b>8 Ketramigrasian</b>							
8.1	Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan	7	6	86	0	Disnakertrans	Tidak Tercapai
<b>9 Energi Dan Sumber Daya Mineral</b>							
9.1	Rasio Elektrifikasi (%)	91,2	90,01	98,70	0	DESDM	Tidak Tercapai
9.2	Rasio desa berlistrik (%)	95,03	93,76	98,66		DESDM	Tidak Tercapai
9.3	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	9	7	77,78		DESDM	Tidak Tercapai
<b>IV. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>1 Perencanaan Pembangunan</b>							
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	100	100	Bappedalitbang	Tercapai
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA(Dokumen)	1	1	100		Bappedalitbang	Tercapai
<b>2 Penelitian Dan Pengembangan</b>							
2.1	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah (%)	95	100%	100%	100%	Bappedalitbang	
<b>3 Setda (Administrasi Pemerintahan)</b>							
3.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	87	85,62	98,41	41,38	Biro Organisasi	Tidak Tercapai
3.2	Nilai SAKIP	B	B	100		Biro Organisasi	Tercapai
3.3	Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100		Biro Organisasi	Tercapai
3.4	Perda Kelembagaan Organisasi Daerah	1 Perda, 5 Pergub	2 Pergub	40		Biro Organisasi	Tidak Tercapai
3.5	Pengadaan Tepat Waktu (%)	20	95,97	100,00		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapai
3.6	Ketersediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (%)	100	99,72	99,72		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Tercapai
3.7	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota serta pembangunan fisik prasarana se- Kalimantan Tengah	100%	100%	100,00		Biro Administrasi Pembangunan	Tercapai



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
3.8	Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100%	80,25%	80,25		Biro Administrasi Pembangunan	Tidak Tercapai
3.9	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	90%	99,38%	100,00		Biro Administrasi Pembangunan	Tercapai
3.10	Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (rancangan)	10	1	10,00		Biro Hukum	Tidak Tercapai
3.11	Jumlah Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan)	50	34	68,00		Biro Hukum	Tidak Tercapai
3.12	Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan)	750	110	14,67		Biro Hukum	Tidak Tercapai
3.13	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi (rancangan prohumda)	185	17	9,19		Biro Hukum	Tidak Tercapai
3.14	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara refresif (produk hukum)	100	130	100,00		Biro Hukum	Tercapai
3.15	Jumlah Rancangan produk hukum daerah kabupaten.kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (rancangan prohumda)	292	113	38,70		Biro Hukum	Tidak Tercapai
3.16	Jumlah dokumen gugatan perkara hukum litigasi yang ditandatangani (perkara)	10	4	40,00		Biro Hukum	Tidak Tercapai
3.17	Jumlah dokumen perkara non litigasi yang ditangani (kasus)	10	4	40,00		Biro Hukum	Tidak Tercapai
3.18	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan aksi HAM (dokumen)	3	1	33,33		Biro Hukum	Tidak Tercapai
3.19	Jumlah buku-buku himpunan produk hukum daerah (buku)	500	500	100,00		Biro Hukum	Tercapai
3.20	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	80%	100%	100,00		Biro Umum	Tercapai
3.21	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2%	0,5%	25,00		Biro Umum	Tidak Tercapai
3.22	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (kali)	150	39	26,00		Biro Umum	Tidak Tercapai
3.23	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda (kali)	100	50	50,00		Biro Umum	Tidak Tercapai
3.24	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan (surat)	215	499	100,00		Biro Umum	Tercapai
3.25	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional (kali)	80	42	52,50		Biro Umum	Tidak Tercapai
3.26	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula (kali)	15	86	100,00		Biro Umum	Tidak Tercapai
3.27	Jumlah dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen)	2	2	100,00		Biro Administrasi Pimpinan	Tercapai
3.28	Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen)	250	63	25,20		Biro Administrasi Pimpinan	Tidak Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
3.29	Jumlah pelayanan kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas)	250	484	100,00		Biro Administrasi Pimpinan	Tercapai
<b>4 Kepegawaian, Pendidikan Serta Pelatihan</b>							
4.1	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	85%	87%	100	50	Badan Kepegawaian Daerah	Tercapai
4.2	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	70%	61%	87		Badan Kepegawaian Daerah	Tidak Tercapai
4.3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	65%	67%	100		Badan Kepegawaian Daerah	Tercapai
4.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	54	41	76		Badan Kepegawaian Daerah	Tidak Tercapai
4.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1006	1010	100		Badan Kepegawaian Daerah	Tercapai
4.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	6000	957	16		Badan Kepegawaian Daerah	Tidak Tercapai
4.7	Indeks Profesionalitas ASN	75,5	71,86	95		Badan Kepegawaian Daerah	Tidak Tercapai
4.8	Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	0.10%	0	0		Badan Kepegawaian Daerah	Tidak Tercapai
4.9	Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80%	83%	100		Badan Kepegawaian Daerah	Tercapai
4.10	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	70%	93%	100		Badan Kepegawaian Daerah	Tercapai
<b>5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>							
5.1	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	80%	bad			BPSDM	
5.2	Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	80%	bad			BPSDM	
5.3	Persentase Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Sosial Kultural yang lulus post test	75%	bad			BPSDM	
5.4	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat	80%	bad			BPSDM	
<b>6 Keuangan</b>							
6.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	bad		33,33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
6.2	Persentase SILPA terhadap APBD	6,33%	5,87%	93		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tercapai
6.3	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,96%	29,87%	96		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak Tercapai
6.4	Persentase belanja kesehatan (10%)	10,03%	9,25%	92		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak Tercapai
6.5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	6,55%	6,55%	100		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tercapai
6.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tercapai
<b>7 Penghubung</b>							
7.1	Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung	2000	bad			Badan Penghubung	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
7.2	Jumlah layanan informasi dan promosi	50	bad			Badan Penghubung	
<b>8 Pengawasan</b>							
8.1	Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Level 3	Level 3	100	100	Inspektorat	Tercapai
8.2	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	100		Inspektorat	Tercapai
8.3	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat 3	Tingkat 3	100		Inspektorat	Tercapai
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai :							
8.4	- BPK RI	60 %	74,79 %	100,00 %	100,00 %	Inspektorat	Tercapai
	- ITJEN Kemendagri/Teknis Lainnya	60 %	87,17 %	100,00 %		Inspektorat	Tercapai
	- Inspektorat	70 %	77,16 %	100,00 %		Inspektorat	Tercapai
8.5	Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan.	45 %	70,65 %	100,00 %		Inspektorat	Tercapai
8.6	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal "B"	60 %	73,68 %	100,00 %		Inspektorat	Tercapai
<b>C. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>I. Kemampuan Ekonomi</b>							
<b>1 Pertanian</b>							
1.1	Nilai Tukar Petani/ NTP (%)	107,5	121,60	100,00	75,00	DPTPHP	Tercapai
1.2	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Tanaman Pangan	101,1	94,63	93,60		DPTPHP	Tidak tercapai
1.3	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Hortikultura	100.9	111,82	100,00		DPTPHP	tercapai
1.4	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Peternakan	105.4	107,74	100,00		DPTPHP	tercapai
<b>2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
2.1	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintahan, Fasilitasi Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama	60	bad			Biro Pemerintahan dan Otda	
<b>II. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
<b>1 Penataan Ruang</b>							
1.1	Jumlah RTR Provinsi Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	6	6	100	100	DPUPR	Tercapai
1.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kab/Kota)	14	14	100		DPUPR	Tercapai
1.3	Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang (%)	60.00	60	100		DPUPR	Tercapai
1.4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (%)	50.00	50	100		DPUPR	Tercapai
1.5	Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60.00	60	100		DPUPR	Tercapai
<b>2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</b>							
2.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	300	220	73	50	Biro Perekonomian	Tidak Tercapai
2.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	55	40	73		Biro Perekonomian	Tidak Tercapai
2.3	Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata (buah)	250	261	100		Disbudpar	Tercapai
2.4	Jumlah Obyek Wisata Unggulan (buah)	14	14	100		Disbudpar	Tercapai
<b>III. Iklim Berinvestasi</b>							
<b>1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat</b>							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja		Tingkat capaian	Tingkat Capaian Per bidang urusan	PD Penanggung Jawab	Keterangan
		2022					
		Target	Realisasi				
1	2	3	4			5	6
1.1	Angka kriminalitas	10,10	10,47	100,00	100,00	Kesbangpol	Tercapai
<b>IV. Sumber Daya Manusia</b>							
<b>1 Ketenagakerjaan</b>							
1.1	Jumlah peserta pelatihan yang memiliki Sertifikat Kompetensi	96	759	100	100	Disnakertrans	Tercapai

Jumlah Capaian indikator per urusan = 3994,55

Jumlah bidang urusan = 68

Persentase Indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target  $\frac{3994,55}{68}$

Persentase Indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target = 58,74

**INSTRUMEN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PERSENTASE PD DENGAN MINIMAL CAPAIAN PROGRAM 80%**

No.	Perangkat Daerah	CAPAIAN PROGRAM	Keterangan
		%	
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	91,44	Tercapai
2	Dinas Pendidikan	100,00	Tercapai
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95,48	Tercapai
4	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	80,00	Tercapai
	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	100,00	Tercapai
5	Dinas Kehutanan	65,25	Tidak tercapai
6	Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	84,00	Tercapai
7	Biro Umum	100,00	Tercapai
8	Badan Pendapatan Daerah	85,51	Tercapai
9	Sekretariat DPRD	91,27	Tercapai
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	92,15	Tercapai
11	Dinas Kesehatan	97,00	Tercapai
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	100,00	Tercapai
13	Dinas Sosial	100,00	Tercapai
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	100,00	Tercapai
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70,00	Tidak tercapai
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia	100,00	Tercapai
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,00	Tercapai
18	Dinas Perhubungan	91,81	Tercapai
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87,57	Tercapai
20	RSJ Kalawa Atei	96,88	Tercapai
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	93,05	Tercapai

No.	Perangkat Daerah	CAPAIAN PROGRAM	Keterangan
		%	
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	99,82	Tercapai
23	Dinas Ketahanan Pangan	100,00	Tercapai
24	Satuan Polisi Pamong Praja	100,00	Tercapai
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100,00	Tercapai
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	94,76	Tercapai
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100,00	Tercapai
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,00	Tercapai
29	Dinas Perkebunan	100,00	Tercapai
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	100,00	Tercapai
31	Inspektorat	99,00	Tercapai
32	Dinas Lingkungan Hidup	99,87	Tercapai
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	99,38	Tercapai
34	Badan Kepegawaian Daerah	90,72	Tercapai
35	Badan Penghubung	100,00	Tercapai
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,00	Tercapai
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	95,00	Tercapai
38	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	87,50	Tercapai
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,00	Tercapai
40	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	76,57	Tidak tercapai
41	Biro Hukum	71,51	Tidak tercapai
42	Biro Administrasi Pimpinan	100,00	Tercapai
43	Biro Pengadaan Barang/Jasa	100,00	Tercapai
44	Biro Administrasi Pembangunan	92,02	Tercapai

No.	Perangkat Daerah	CAPAIAN PROGRAM	Keterangan
		%	
45	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	100,00	Tercapai
46	Biro Organisasi	86,00	Tercapai

**Jumlah PD dengan capaian kinerja program minimal 80% = 42 PD**

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase PD dengan minimal capaian program 80\%} &= \frac{42}{46} \times 100 \\
 &= 91,30\%
 \end{aligned}$$